



L K I P
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO
TAHUN 2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



L K I P

2024

L a p o r a n
K i n e r j a
I n s t a n s i
P e m e r i n t a h

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO TAHUN 2025

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Moh.Ryan Bilondatu, S.Kom	Penyusun Rencana dan Pelaporan	02 Januari 2025	
2.	Diperiksa	Adi Prabowo, S.Kom.,M.A	Kepala Subag. Tata Usaha	07 Januari 2025	
3.	Diperiksa	Hotden Henrikus Naibaho, S.T.,M.M.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	07 Januari 2025	
4.	Diperiksa	Arham Safti, S.T., M.M.TR.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	07 Januari 2025	
5.	Diperiksa	Dimas Winardy, S.T., M.T.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	07 Januari 2025	
6.	Disetujui	Zulmardi, A.TD.,M.M	Kepala Balai	09 Januari 2025	



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo



Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Gorontalo, 09 Januari 2025

KERALA BALAI,



ZULMARDI, A.TD.,M.M

NIP. 19680317 199103 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah direview pada tahun 2024 sebanyak 14 Indikator dan 5 Sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo telah melaksanakan dengan baik, Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasarnya itu sebesar 100%. dapat dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target (kurang dari 100%) namun dalam kategori baik karena sudah mencapai 99%. Hal ini menandakan capaian sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 -2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	I-2
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi	I-3
I.3 Sumber Daya Manusia	I-5
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I-6
I.5 Sistematika Laporan	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	II-14
• Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	II-17
II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-18
• Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-19
• Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-20
• Uraian Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	III-31
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja	III-32
A. SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
• Uraian Sasaran Program	
A.1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	III-35
A.1.1. Definisi indikator Kinerja	
A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
A.1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan	
A.1.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	
A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024	
A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024	
A.2. IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	III-39
A.2.1. Definisi indikator Kinerja	
A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
A.2.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan	
A.2.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	
A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024	





- A.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

A.3. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi III-40

- A.3.1. Definisi indikator Kinerja
A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
A.3.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
A.3.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
A.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
A.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

A.4. IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda III-43

- A.4.1. Definisi indikator Kinerja
A.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
A.4.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
A.4.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
A.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
A.4.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

A.5. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan III-44

- A.5.1. Definisi indikator Kinerja
A.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
A.5.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
A.5.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
A.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
A.5.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

A.6. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi III-47

- A.6.1. Definisi indikator Kinerja
A.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
A.6.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
A.6.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
A.6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024



A.6.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

B. SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

• Uraian Sasaran Program

B.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A III-51

- B.1.1. Definisi indikator Kinerja
- B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- B.1.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- B.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- B.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

B.2. IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal

Tipe A III-55

- B.2.1. Definisi indikator Kinerja
- B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.2.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- B.2.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- B.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- B.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

B.3. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP III-58

- B.3.1. Definisi indikator Kinerja
- B.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.3.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- B.3.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- B.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- B.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024



C. SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

- C.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal III-62**

- C.1.1. Definisi indikator Kinerja
 - C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - C.1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
 - C.1.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
 - C.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
 - C.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

- C.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat III-65**

- C.2.1. Definisi indikator Kinerja
 - C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - C.2.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
 - C.2.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
 - C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022 dan Tahun 2024
 - C.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

- C.3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan III-69**

- C.3.1. Definisi indikator Kinerja
 - C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - C.3.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
 - C.3.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
 - C.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
 - C.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024



C.4. IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif.....	III-71
C.4.1. Definisi indikator Kinerja	
C.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
C.4.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan	
C.4.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	
C.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024	
C.4.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024	
C.5. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.....	III-72
C.5.1. Definisi indikator Kinerja	
C.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
C.5.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan	
C.5.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	
C.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024	
C.5.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024	
C.6. IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar International (UN-ECE)*....	III-76
C.6.1. Definisi indikator Kinerja	
C.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
C.6.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan	
C.6.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	
C.6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024	
C.6.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024	
C.7. IKK 3.7 Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	III-80
C.7.1. Definisi indikator Kinerja	
C.7.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
C.7.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan	
C.7.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang	
C.7.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024	
C.7.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024	



C.8. IKK 3.8 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan

Alur Pelayaran SDP III-83

- C.8.1. Definisi indikator Kinerja
- C.8.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.8.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- C.8.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- C.8.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- C.8.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

D. SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- **Uraian Sasaran Program**

D.1. IKK 4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis

Transportasi Darat III-87

- D.1.1. Definisi indikator Kinerja
- D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D.1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- D.1.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- D.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- D.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

E. SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

- **Uraian Sasaran Program**

E.1. IKK 5.1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen

Perhubungan Darat III-91

- E.1.1. Definisi indikator Kinerja
- E.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- E.1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- E.1.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- E.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- E.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024





III.3 Realisasi Anggaran..... III-96

III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024

III.3.1.1 Pagu Anggaran

- A.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
- A.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
- A.3 Uraian Surat Pengasahan Revisi Anggaran

III.3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2024

- A.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
- A.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
- A.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
- A.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

III.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2021–2024

III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

III.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

III.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

III.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

III.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4 Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup IV-102

IV.1.1 Ringkasan Capaian

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

LAMPIRAN I Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024

LAMPIRAN II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

LAMPIRAN III Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

LAMPIRAN IV Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

LAMPIRAN V Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

LAMPIRAN VI Rencana Aksi Tahun 2024

LAMPIRAN VII Revisi Rencana Aksi I Tahun 2024

LAMPIRAN VIII Revisi Rencana Aksi II Tahun 2024

LAMPIRAN IX Revisi Rencana Aksi II Tahun 2024

LAMPIRAN X Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024 (Bulan Januari s.d Bulan Desember)





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

BAB II
PERENCANAAN
KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

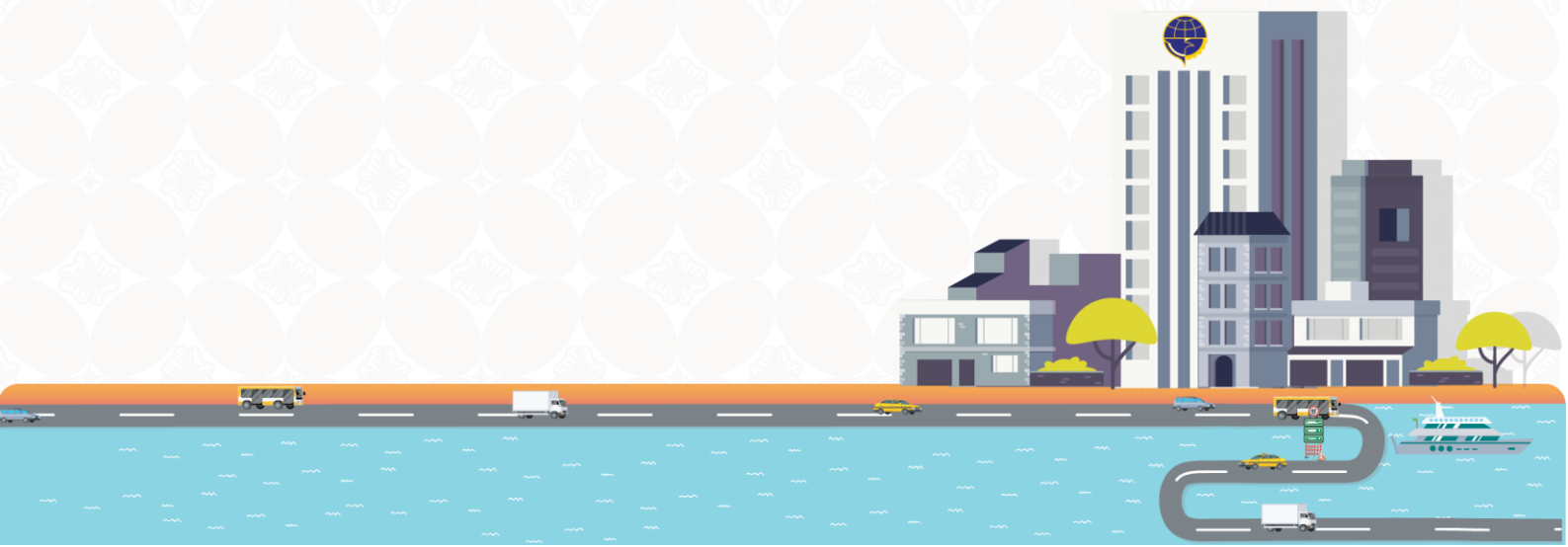
BAB IV
PENUTUP

I.1

LATAR BELAKANG

I. 1. Latar Belakang

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo dituntut untuk menyelenggaraan sistem pemerintahan dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.



I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018, Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan 154 Tahun 2016 tentang tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo. dengan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pasal 1

- (1) Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Balai Pengelola Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala.

- b. Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal Tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

- c. Fungsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

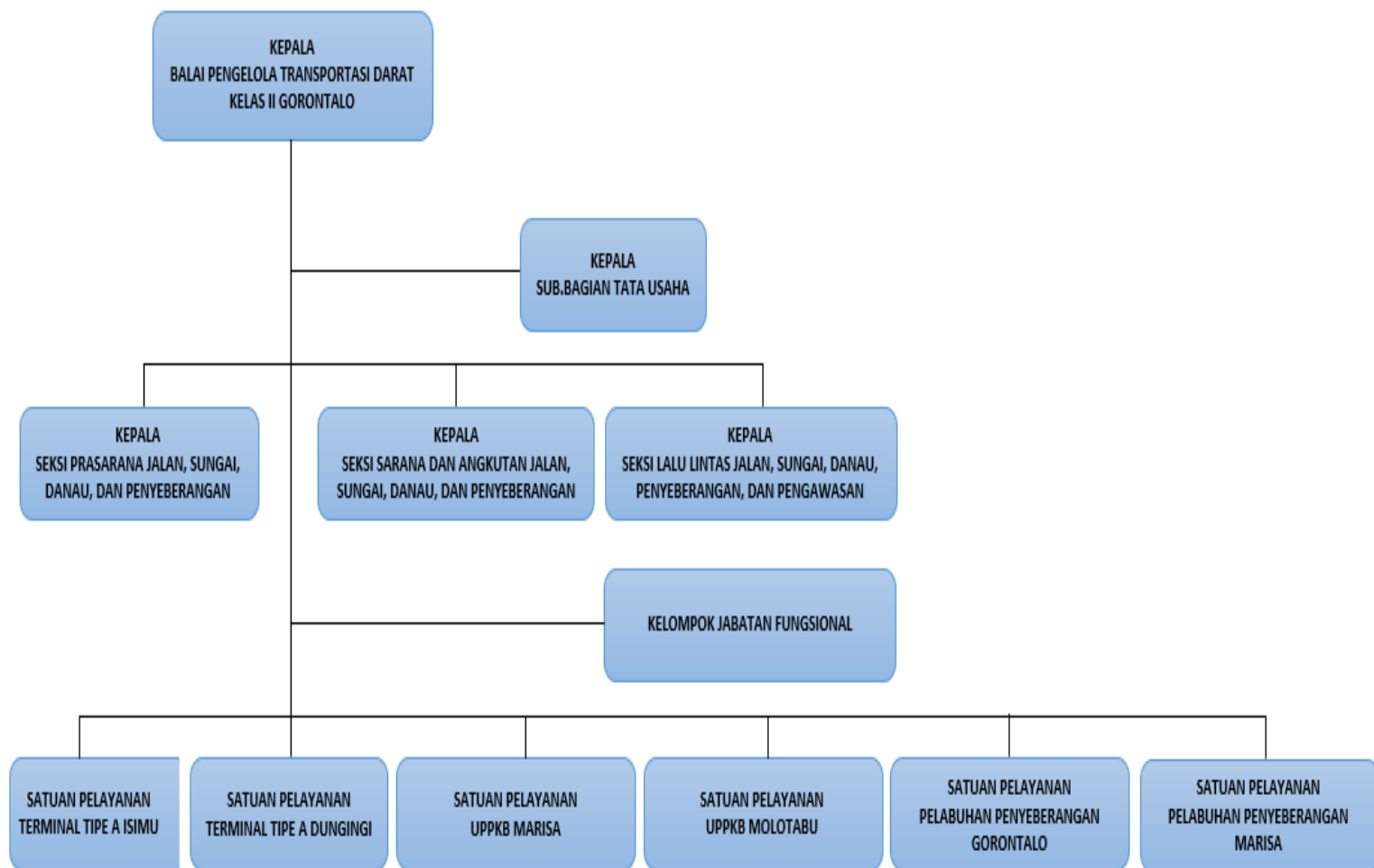
- a. penyusunan rencana, program, anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
- c. pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- e. pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO



I.2.1. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo mempunyai tugas Melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
- c. pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- e. pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Tugas dan tanggung jawab masing – masing seksi, sub bagian dan kelompok jabatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo, terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha.
2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
4. Seksi Lalu lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

I.2.2 Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber data manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

I.2.3 Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengeoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

I.2.4 Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi pelatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang subsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayanan perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

I.2.5 Seksi Lalu lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas,



pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelayaklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayanan sungai, danau dan penyeberangan, rambu alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaraan pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayanan sungai, danau, dan penyeberangan.

I. 3. Sumber Daya Manusia

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak **110 orang**, CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) **17 Orang**, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) **1 Orang**, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) sebanyak **139 Orang** dan Pramubakti **7 Orang** dengan Total Keseluruhan berjumlah **274 Orang**.

I. 4. Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1. Kewenangan

- a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - 3) Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009
Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.
- b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
 - 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.
- c. PM No. 122 Tahun 2018
Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:
 - 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
 - 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.





I.4.2. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (BPLJSKB dan BPTD). Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan adanya penambahan 8 BPTD yang sebelumnya 25 BPTD menjadi 33 BPTD.

I.4.3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana.

I.4.4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

I.4.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo Tahun 2023 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

I. 5. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

- **Bagan Struktur Organisasi**



- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

- **Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023**

II.3 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- **Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2023**
- **Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2023**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

A. SK 1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

- **Uraian Sasaran Program**

A.1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan III-35

- A.1.1. Definisi indikator Kinerja
- A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- A.1.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- A.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- A.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

A.2. IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda III-39

- A.2.1. Definisi indikator Kinerja
- A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.2.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- A.2.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- A.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- A.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

A.3. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi III-40

- A.3.1. Definisi indikator Kinerja
- A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.3.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- A.3.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- A.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024



A.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

A.4. IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda III-43

- A.4.1. Definisi indikator Kinerja
- A.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.4.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- A.4.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- A.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- A.4.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

A.5. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan III-44

- A.5.1. Definisi indikator Kinerja
- A.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.5.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- A.5.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- A.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- A.5.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

A.6. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi III-47

- A.6.1. Definisi indikator Kinerja
- A.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- A.6.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- A.6.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- A.6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- A.6.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

B. SK 2 Meningkatkan Pelayan Transportasi Darat

• **Uraian Sasaran Program**

B.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe A III-51

- B.1.1. Definisi indikator Kinerja
- B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- B.1.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- B.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024



B.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

B.2. IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal

Tipe A III-55

- B.2.1. Definisi indikator Kinerja
- B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.2.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- B.2.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- B.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- B.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

B.3. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP III-58

- B.3.1. Definisi indikator Kinerja
- B.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.3.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- B.3.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- B.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- B.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

C. SK 4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat

• Uraian Sasaran Program

C.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah

Terpasang Terhadap Kondisi Ideal III-62

- C.1.1. Definisi indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- C.1.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- C.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- C.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

C.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB

Ditjen Perhubungan Darat III-65

- C.2.1. Definisi indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.2.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- C.2.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang





- C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022 dan Tahun 2024
- C.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024
- C.3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan III-69**
 - C.3.1. Definisi indikator Kinerja
 - C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - C.3.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
 - C.3.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
 - C.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
 - C.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024
- C.4. IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif..... III-71**
 - C.4.1. Definisi indikator Kinerja
 - C.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - C.4.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
 - C.4.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
 - C.4.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
 - C.4.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024
- C.5. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan III-72**
 - C.5.1. Definisi indikator Kinerja
 - C.5.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - C.5.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
 - C.5.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
 - C.5.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
 - C.5.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024
- C.6. IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar International (UN-ECE)*.... III-76**
 - C.6.1. Definisi indikator Kinerja
 - C.6.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - C.6.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
 - C.6.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
 - C.6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024



C.6.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

C.7. IKK 3.7 Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor III-80

- C.7.1. Definisi indikator Kinerja
- C.7.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.7.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- C.7.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- C.7.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- C.7.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

C.8. IKK 3.8 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP III-83

- C.8.1. Definisi indikator Kinerja
- C.8.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.8.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- C.8.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- C.8.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- C.8.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

D. SK 5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

• **Uraian Sasaran Program**

D.1. IKK 4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat III-87

- D.1.1. Definisi indikator Kinerja
- D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D.1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- D.1.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- D.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- D.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

E. SK 6 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

• **Uraian Sasaran Program**

E.1. IKK 5.1 Tingkat penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat..... III-91

- E.1.1. Definisi indikator Kinerja
- E.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024





- E.1.3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
- E.1.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang
- E.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024
- E.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020–2024

III.3 Realisasi Anggaran..... III-96

- III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024
 - III.3.1.1 Pagu Anggaran
 - A.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
 - A.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - A.3 Uraian Surat Pengasahan Revisi Anggaran
 - III.3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2024
 - A.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
 - A.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - A.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - A.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
 - III.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2021–2024
- III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024
 - III.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
 - III.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - III.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
 - III.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja
- III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- III.3.4 Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

- IV.1 Penutup..... IV-102
 - IV.1.1 Ringkasan Capaian
- IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

- LAMPIRAN I** Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
- LAMPIRAN II** Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- LAMPIRAN III** Rencana Aksi Tahun 2024
- LAMPIRAN IV** Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- LAMPIRAN V** Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- LAMPIRAN VI** Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- LAMPIRAN VII** Revisi Rencana Aksi I Tahun 2024
- LAMPIRAN VIII** Revisi Rencana Aksi II Tahun 2024
- LAMPIRAN IX** Revisi Rencana Aksi II Tahun 2024
- LAMPIRAN X** Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024 (Bulan Januari s.d Bulan Desember)





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

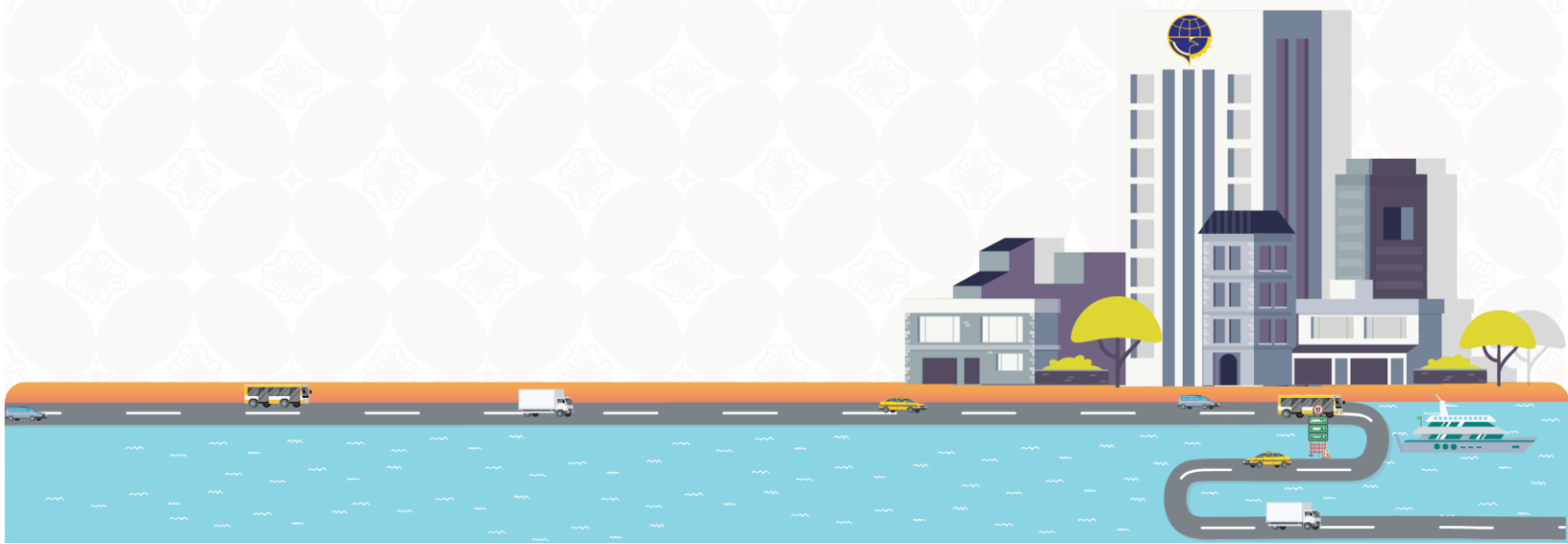
BAB IV PENUTUP

II.1

URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

II. 1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo Tahun 2020 -2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020-2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan perhubungan.





Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersil.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo sesuai Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020–2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15

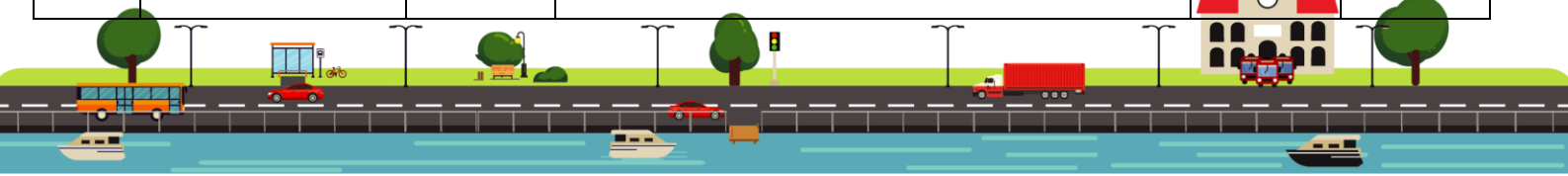


		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo Tahun 2024 terdiri dari Indikator Kinerja Utama guna mencapai Sasaran dengan target yang akan dicapai. RKT Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2





SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

II. 2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

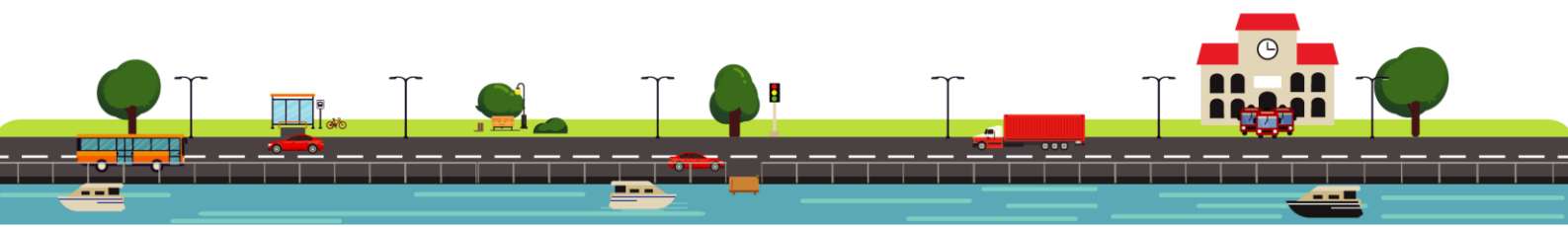
Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 74.093.065.000,- adalah sebagai berikut:





SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	2
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90





Kegiatan:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	21.557.984.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	6.773.494.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	21.902.816.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	4.014.970.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	357.216.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	6.849.747.000
7. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	12.636.838.000
Total	Rp.	74.093.065.000

II.2.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2022 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 75.620.586.000,- adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100



		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan:

Anggaran

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	21.557.984.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	6.773.494.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	21.902.816.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	4.014.970.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	357.216.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	6.849.747.000
7. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	14.164.359.000

Total

Rp.

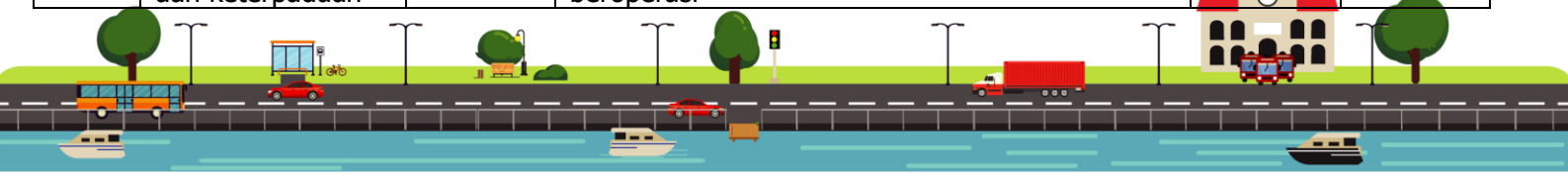
75.620.586.000

II.2.2 Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2022 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 79.171.374.000,- adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2





	antarmoda transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan:	Anggaran	
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	21.544.151.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	7.169.994.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	22.186.766.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	4.014.970.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	357.216.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	7.391.397.000
7. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	16.506.880.000
Total	Rp.	79.171.374.000



II.2.3 Uraian Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2022 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 79.838.578.000,- adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	2
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Anggaran





Kegiatan:

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	21.544.151.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	7.837.198.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	22.186.766.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	4.014.970.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	357.216.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	7.391.397.000
7. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	16.506.880.000
Total	Rp.	79.838.578.000





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

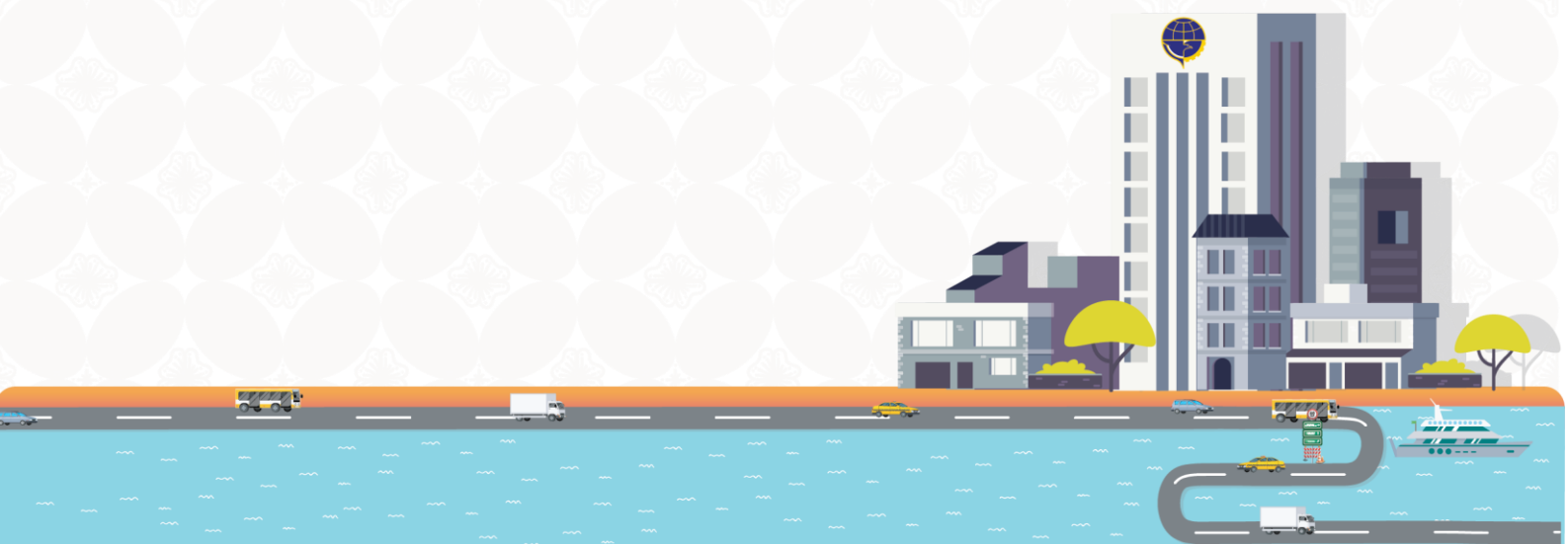
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

III.1

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.



III. 2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$



- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo Tahun 2024, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.





Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	TW. I			TW. II			TW. III			TW. IV		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
SK. 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					100.00			100.00			100.00			100.00
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00
IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00
IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat					100.00			100.00			100.00			100.00
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95.00	23.75	23.75	100.00	47.50	47.50	100.00	71.25	71.25	100.00	95.00	95.00	100.00
IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95.00	23.75	23.75	100.00	47.50	47.50	100.00	7125.00	71.25	100.00	95.00	95.00	100.00
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90.00	22.50	22.50	100.00	45.00	45.00	100.00	67.50	67.50	100.00	90.00	90.00	100.00
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					60.00			60.00			100.00			80.00
IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	55.00	100.00	90.00	90.00	100.00
IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15.00	3.75	3.75	100.00	7.50	7.50	100.00	11.25	11.25	100.00	15.00	15.00	100.00
IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00
IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00
IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					100.00			100.00			100.00			100.00
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90.00	22.50	22.50	100.00	45.00	45.00	100.00	67.50	67.50	100.00	90.00	90.00	100.00
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					100			100			100			100
IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90.00	24.17	24.17	100.00	49.58	49.58	100.00	74.37	74.37	100.00	99.16	99.16	100.00
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						92.00			92.00			100.00			96.00
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						85.71			85.71			100.00			92.86
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						13.00			13.00			13.00			13.00
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						6.00			6.00			6.00			6.00



Selama tahun 2024, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 14 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Program ialah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
2. IKK1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda
3. IKK1.3 Jumlah Terminal Tipe-A Dan Terminal Barang Yang Beroperasi
4. IKK1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda
5. IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
6. IKK1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi darat pada kawasan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

* RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya.

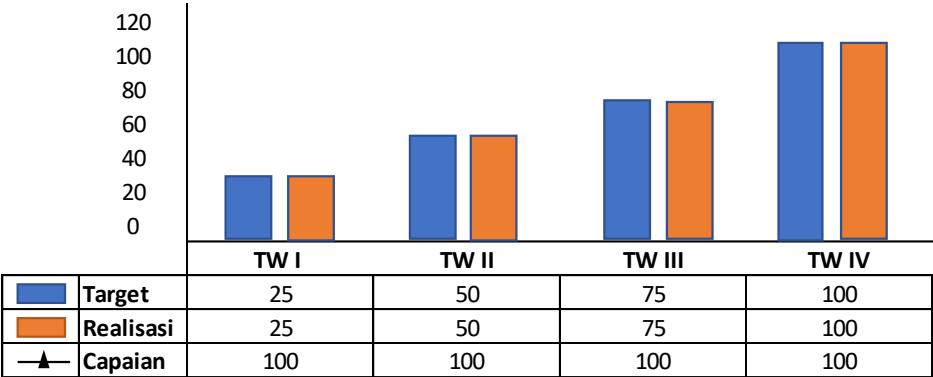


Keterangan:

1. Layanan Transportasi Darat berupa:
 - a. Angkutan Antarkota Antar Provinsi (AKAP)
 - b. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)
2. Fasilitas Transportasi Darat merupakan simpul dan sarana transportasi darat yang sudah selesai dibangun serta eksisting berupa:
 - a. Terminal Tipe-A;
 - b. Terminal Angkutan Barang;
3. Angkutan Umum berupa:
 - a. AKAP;
 - b. AKDP;
4. Kawasan Prioritas terdiri dari:
 - a. 4 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)
 - 1) KSP Pantai Botutonuo;
 - 2) KSP Pantai Olele;
 - 3) KSP Pantai Molotabu;
 - 4) KSP Tempat Pemandian
Lombongo
 - b. 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
 - 1) Kota Manado
 - 2) Kota Bitung
 - 3) Kota Kotamobagu
 - 4) Kota Palu
 - 5) Kota Makassar

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Realisasi kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan tahun 2024 sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan



Grafik III.1 Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan



a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3385 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Jalan Perintis Tahun 2022, sebanyak 8 Trayek yang ditetapkan di Provinsi Gorontalo untuk dilayani oleh keberintisan angkutan jalan sebagaimana terdapat pada Lampiran sebagai berikut :

26	GORONTALO	205	Gorontalo - Papualangi	205
		206	Gorontalo - Malango	251
		207	Gorontalo - Bongo Tiga	93
		208	Gorontalo - Pelabuhan Anggrek	75
		209	Gorontalo - Buol	317
		210	Gorontalo - Pinolosian	197
		211	Gorontalo - Saritani	114
		212	Gorontalo - Batu Layar	47

Target capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Keberintisan Angkutan Jalan dalam operasional pelayannya ditargetkan realisasi pelayannya mencapai 100%.

• Faktor Keberhasilan

1. Pelaksanaan keberintisan angkutan jalan di Provinsi Gorontalo membantu menghubungkan ke daerah-daerah terpencil.
2. Melayani pergerakan transportasi masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

• Faktor Kegagalan

1. Kondisi sarana angkutan jalan yang kurang terawat.
2. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan.
3. Jadwal keberangkatan yang tidak menentu.

Dari data realisasi operasional angkutan jalan maka dapat di hitung realisasi indikator kegiatan, sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Layanan Keberintisan Angkutan Jalan sampai dengan Triwulan IV terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100%.

• Penganggaran berdasarkan POK

Anggaran 4637 – Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat dengan nomenklatur 051 – Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional).



Nilai Pagu untuk Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 Sebesar **Rp. 5.200.279.000,-**

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp.5.200.279.00,-** (100%).Dari Total Pagu **Rp. 5.200.279.00,-**

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan pengawasan internal terkait Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Perlunya peningkatan oleh penyedia jasa Transportasi dalam mensosialisasikan kegiatan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) agar layanan ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus.
3. Menyusun dan menetapkan rencana induk setiap terminal sebagai pedoman pengembangan yang terarah dan terukur.
4. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan masterplan pengembangan yang telah ditetapkan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

Realisasi kinerja keperintisan angkutan jalan 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 tetap sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. untuk rincian capaian pada Tahun 2024 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

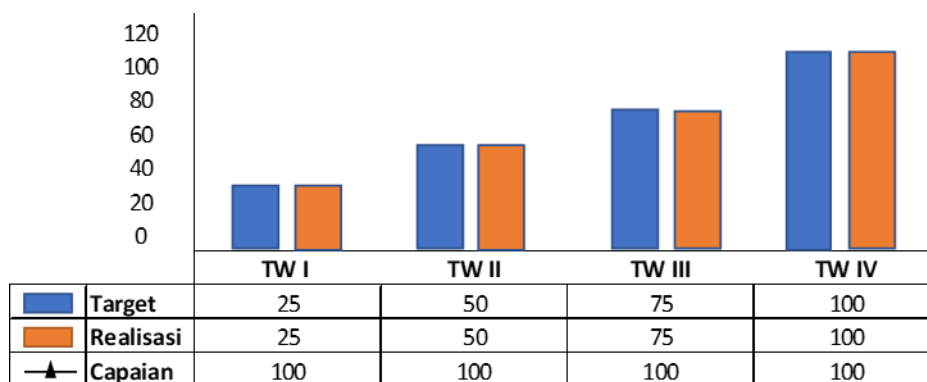
Tabel III. 2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020,2021,2022,2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan																	
1	IKK 1.1	90	85	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tetap

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 capaian kinerja mencapai 100%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.





Gambar III.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda

a.2.1. Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar moda yang tercantum di Perjanjian Kinerja Bptd Kelas II Gorontalo tahun 2024 belum adanya capaian kinerja karena didalam Renstra Ditjen Hubdat 2020-2024 untuk kegiatan tersebut belum di anggarkan.

a.2.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Belum adanya perbandingan realisasi dan target kinerja untuk Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar moda.

a.2.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Belum adanya analisa keberhasilan/kegagalan untuk kegiatan Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar moda.

a.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk tahun 2024 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar moda ini belum adanya capaian dimasa yang akang datang.

a.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

Belum adanya perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja

a.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Belum adanya perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja pada tahun 2024 dalam Renstra Ditjen Hubdat.

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.3.1 Definisi Indikator Kinerja

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi dihitung berdasarkan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi darat pada kawasan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Keterangan:

1. Layanan Transportasi Darat berupa:
 - a. Angkutan Antarkota Antar Provinsi (AKAP)
 - b. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)
2. Fasilitas Transportasi Darat merupakan simpul dan sarana transportasi darat yang sudah selesai dibangun serta eksisting berupa:
 - a. Terminal Tipe-A;
 - b. Terminal Angkutan Barang;
3. Angkutan Umum berupa:
 - a. AKAP;
 - b. AKDP;

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK1.3 = \text{Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi}$$

a.3.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi sampai dengan saat ini tahun 2024 tetap 2 Lokasi.



Grafik III.2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.3.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola



Transportasi Darat Kelas II Gorontalo memiliki 2 Terminal Tipe A yang beroperasi, dan belum adanya Pembangunan Terminal Barang. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Triwulan IV Tahun 2024 memiliki persentase capaian sebesar 100% yang menunjukkan bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Tahun 2024 didukung dengan kegiatan operasional layanan Terminal Tipe A yang melayani para penumpang yang ingin menggunakan jasa layanan kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Perintis.

Jumlah pelayanan dan fasilitas transportasi darat dan penyeberangan terdiri dari:

1. Angkutan Jalan

- a. Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Antarkota Dalamprovinsi (AKDP)

Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Antarkota Dalamprovinsi (AKDP). trayek yang dilayani sejumlah 33 trayek dan semuanya terealisasi 100% sampai dengan akhir tahun 2024.

Uraian Trayek Yang Dilayani	
AKAP	AKDP
1. Gorontalo - Manado	1. Gorontalo - Anggrek
2. Gorontalo - Manado	2. Pekanbaru - Bongo 3
3. Gorontalo - Manado	3. Gorontalo - Malango
4. Gorontalo - Manado - Bitung	4. Gorontalo - Biluhu
5. Gorontalo - Manado - Bitung	5. Gorontalo - Dulupi
6. Gorontalo - Manado - Bitung	6. Gorontalo - Saritani
7. Gorontalo - Kotamobagu	7. Gorontalo - Batu Layar
8. Gorontalo - Kotamobagu	8. Gorontalo - Tolinggula
9. Gorontalo - Palu	
10. Gorontalo - Palu	
11. Gorontalo - Makassar	
12. Gorontalo - Palu	
13. Gorontalo - Buol - Palu - Malango	
14. Gorontalo - Palu	

2. Terminal Yang Beroperasi

- a. Terminal Tipe A Duingi

Terminal Tipe-A melayani Kendaraan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP),Angkutan Antarkota Dalamprovinsi (AKDP) dan juga sebagai terminal barang. Kendaraan yang beroperasi sejumlah 70 unit.

- b. Terminal Tipe A Isimu

Berdasarkan data secara geografis lokasi terminal terletak di tempat yang sangat strategis.yaitu :

1. Dekat dengan Bandara Djalaludin Gorontalo dan
2. Pusat Perdagangan Tradisional
3. Tempat Wisata

Terminal Tipe A Isimu juga menjadi tempat titik transitnya bus AKAP dan AKDP yang melintas.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan SOP dan aturan-aturan yang ada.
2. Penyeberluasan informasi lebih efektif tersampaikan melalui akun media social dan website Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan dan kinerja.

- **Faktor Kegagalan**

1. Kurangnya SDM yang ada di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A.
2. Fasilitas yang kurang memadai.
3. Kelangkaan BBM (Solar) untuk kendaraan yang melayani angkutan AKAP dan Perintis.
4. Masih adanya kendaraan yang beroperasi tidak dalam trayek dan angkutan liar.

- **Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4638 – Pelayanan Transportasi Darat dengan nomenklatur 051 – Operasional Terminal Penumpang Tipe A.

Nilai Pagu untuk Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2024 Sebesar **Rp. 2.697.514.000,-**

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan monitoring Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. 2.697.514.000,-** (100%). Dari Total Pagu **Rp. 2.697.514.000,-**

a.3.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perlunya peningkatan oleh penyedia jasa Transportasi dalam mensosialisasikan kegiatan KSPN agar layanan ini dapat dilaksanakan secara menerus.
3. Menyusun dan menetapkan rencana induk setiap terminal sebagai pedoman pengembangan yang terarah dan terukur.
4. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan masterplan pengembangan yang telah ditetapkan.



a.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

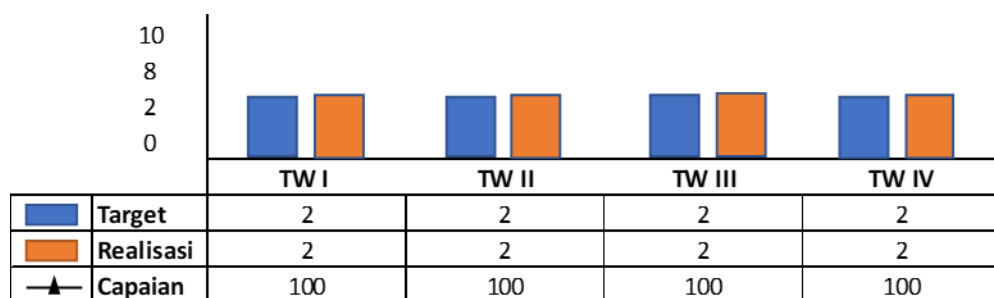
Realisasi kinerja Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 tetap sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. untuk rincian capaian pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020,2021,2022,2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi																	
1	IKK 1.3	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	Tetap

a.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 tetap sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

a.4.1 Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang tercantum di Perjanjian Kinerja Bptd Kelas II Gorontalo Tahun 2024 belum adanya capaian kinerja karena didalam Renstra Ditjen Hubdat 2020-2024 untuk kegiatan tersebut belum di anggarkan.



a.4.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Belum adanya perbandingan realisasi dan target kinerja untuk Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda.

a.4.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Belum adanya analisa keberhasilan/kegagalan untuk kegiatan Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda.

a.4.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk tahun 2024 Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda. ini belum adanya capaian dimasa yang akan datang.

a.4.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

Belum adanya perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja.

a.4.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Belum adanya perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja pada tahun 2024 dalam Renstra Ditjen Hubdat.

IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.

a.5.1 Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan sebesar 90% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.5 = \frac{\text{Jumlah Lintasan Perintis Angkutan Penyeberangan Yang Terlayani}}{\text{Jumlah Lintasan Perintis Angkutan Penyeberangan Yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

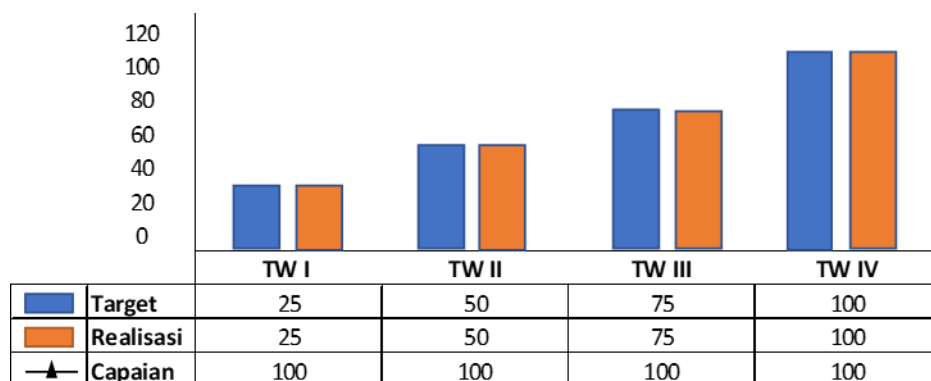
Layanan Lintasan Penyeberangan Angkutan Perintis Yang di Layani :

- Gorontalo – Pagimana
- Gorontalo – Wakai – Ampa
- Marisa – Dolong - Ampa

a.5.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Realisasi kinerja Pelaksanaan Pelayanan keperintisan Angkutan Penyeberangan tahun 2024 sebesar 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan





Grafik III.3 Capaian Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.5.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4978/AP.204/DRJD/2020 tanggal 26 oktober tahun 2020 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022, sebanyak 22 lintasan ditetapkan untuk dilayani Angkutan Penyeberangan Perintis. Dari jumlah lintas tersebut terdapat 5 lintasan penyeberangan yang terlayani untuk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo.

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan keperintisan Angkutan Penyeberangan Triwulan IV tahun 2024 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sebesar 100%. Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan yang telah terlaksana adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

1. Telah terlaksananya pelayanan sesuai SOP.
2. Penyeberluasan informasi lebih efektif tersampaikan melalui akun media social dan website Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo.
3. Melakukan monitoring dan evaluas secara berkala, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target dan capaian yang diinginkan.

- **Faktor Kegagalan**

1. Kurangnya SDM,dalam melaksanakan pengoperasional
2. Fasilitas yang belum memadai.



3. Tidak terpenuhinya beberapa lintasan oleh Kapal Penyeberangan.

- **Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4637 – Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat
Nilai Pagu untuk Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan
keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2024 Sebesar
Rp. 16.343.872.000,-

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan keperintisan
Angkutan Penyeberangan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV
Sebesar **Rp. 16.343.872.000,-**

a.5.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap jadwal operasional kapal yang telah ditetapkan agar mewujudkan kepatuhan operasional.
2. Meningkatkan pelayanan.
3. Menambah armada/kapal pada lintas keperintisan.
4. Menambah trip pelayanan lintas keperintisan.
5. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan masterplan pengembangan yang telah ditetapkan.

a.5.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

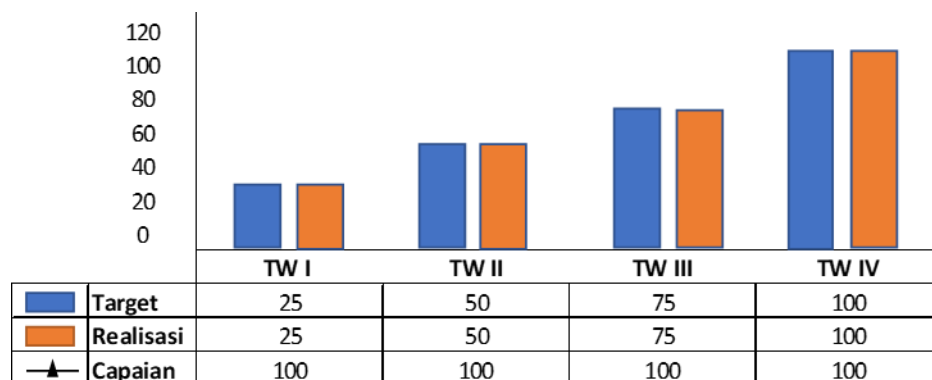
Realisasi kinerja keperintisan angkutan jalan sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 tetap sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. untuk rincian capaian pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan																	
1	IKK 1.5	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tetap



a.5.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 tetap sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.6.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan data aset Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Perhubungan Darat, jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang sudah selesai dibangun serta eksisting hingga Tahun 2022 adalah sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) Pelabuhan. Dari jumlah pelabuhan tersebut terdapat 74 (tujuh puluh empat) Pelabuhan yang melayani 41 (empat puluh satu) Kawasan Strategis Nasional.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional dan pelayanan pelabuhan SDP serta pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran maka dibentuklah Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang membawahi Wilayah Kerja. Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo hanya melayani pelabuhan perintis yang beroperasi yang dibangun melalui dana APBN.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut :

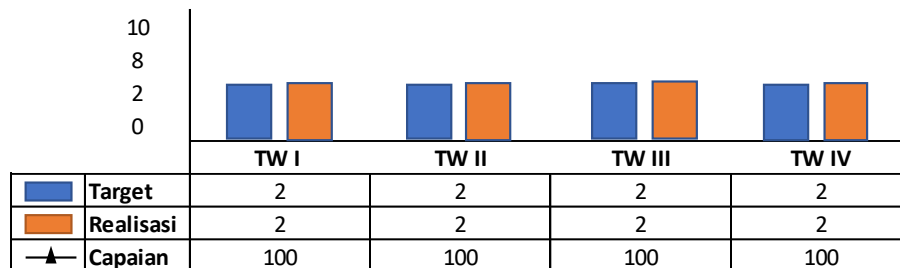
$$IKK1.6 = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan}}{\text{tahun (n)}}$$

Jumlah Pelabuhan Perintis Yang Beroperasi di Provinsi Gorontalo :

1. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo.
2. Pelabuhan Penyeberangan Paguat.

a.6.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Realisasi kinerja jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 2 lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 2 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.



Grafik III.4 Persentase Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.6.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik/turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional dan pelayanan pelabuhan SDP serta pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran maka dibentuklah Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang membawahi Wilayah Kerja. Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada wilayah kerja BPTD Kelas II Gorontalo hanya melaksanakan pengawasan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan SDP.

Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi di Provinsi Gorontalo sebanyak 2 lokasi.

Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan yang telah terlaksana adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (100)}}{\text{Target (100)}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi yaitu sebesar 100%



- **Faktor Keberhasilan**

1. Telah terlaksananya pelayanan sesuai SOP.
2. Membantu menghubungkan ke daerah-daerah yang terpencil.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target dan capaian yang diinginkan.

- **Faktor Kegagalan**

1. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengoperasional.
2. Fasilitas yang belum memadai.
3. Tidak terpenuhinya beberapa lintasan oleh Kapal Penyeberangan.

- **Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4638 – Pelayanan Transportasi Darat

Nilai Pagu untuk Kegiatan Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2024 Sebesar **Rp. 2.472.480.000,-**

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. 2.472.480.000,-**

a.6.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan dan pelayanan pada Pelabuhan.
2. Perlu adanya peningkatan fasilitas yang memadai.
3. Menyusun dan menetapkan rencana induk setiap pelabuhan sebagai pedoman pengembangan yang terarah dan terukur.
4. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan masterplan pengembangan yang telah ditetapkan.

a.6.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan Tahun 2024

Realisasi kinerja Pelabuhan SDP Yang Beroperasi sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 tetap sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. untuk rincian capaian pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

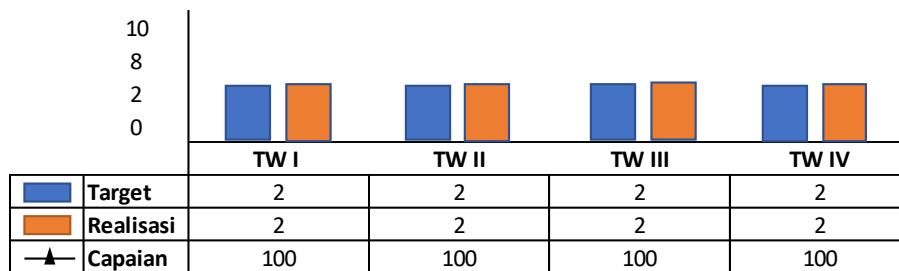


No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi																	
1	IKK 1.6	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tetap

Tabel III. 4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun

a.6.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Pelabuhan SDP Yang Beroperasi sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 capaian kinerja mencapai 100%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal Tipe A



2. IKK 2.2. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A
3. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

b.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo memiliki 2 Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A, yaitu Terminal Tipe A Dungi dan Terminal Tipe A Isimu sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022. dan

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan

Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup :

1. Pelayanan keselamatan
2. Pelayanan keamanan
3. Pelayanan kehandalan/keteraturan
4. Pelayanan kenyamanan
5. Pelayanan kemudahan/keterjangkauan

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe -A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Untuk menghitung persentase Operasional Terminal Tipe A dapat menggunakan rumus berikut :

$$IKK\ 2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A Yang Memenuhi (SP)}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

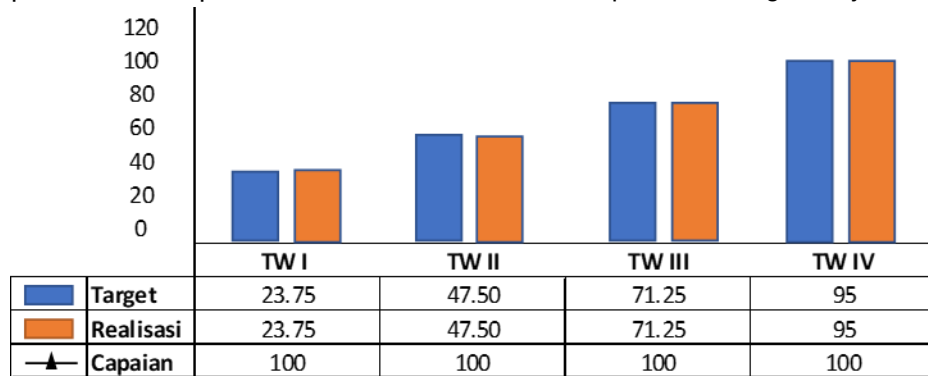
Keterangan:

1. Layanan Transportasi Darat berupa:
 - a. Angkutan Antarkota Antar Provinsi (AKAP)
 - b. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)
 - c. Angkutan Perintis.
2. Fasilitas Transportasi Darat merupakan simpul dan sarana transportasi darat yang sudah selesai dibangun serta eksisting berupa:
 - a. Terminal Tipe-A.
 - b. Pelabuhan Penyeberangan.
3. Angkutan Umum berupa:
 - a. AKAP.
 - b. AKDP.

- c. Perintis.
4. Trayek Yang Dilayani AKAP, AKDP dan Perintis.
 - a. AKAP (5 Trayek) : Gorontalo – Manado – Bitung – Kotamobagu – Palu – Makasar
 - b. AKDP (8 Trayek) : Gorontalo - Kec. Anggrek - Desa Bongo 3 - Kec. Malango - Kec. Biluhu - Kec. Dulupi - Desa Saritani - Desa Batulayar - Kec. Tolinggula
 - c. Perintis (8 Trayek) : Gorontalo – Desa Papualangi – Desa Malango – Desa Bongo3 – Pelabuhan Anggrek – Kab. Buol – Kec. Pinolosian – Desa Saritani – Desa Batulayar

b.1.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 95%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian Persentase Pelaksanaan Keperintisan angkutan jalan



Grafik III.5 Capaian Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

b.1.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan PP RI No.43 tahun 1993 Terminal penumpang Tipe A, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Terminal penumpang Tipe B, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sesuai target dan realisasi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (95)}}{\text{Target (95)}} \times 95\% = 95\%$$



Dengan demikian, keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 95%

- **Faktor Keberhasilan**

1. Pelaksanaan keperintisan angkutan jalan di Provinsi Gorontalo membantu menghubungkan ke daerah-daerah terpencil.
2. Melayani pergerakan transportasi masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

- **Faktor Kegagalan**

1. Kondisi sarana angkutan jalan yang kurang terawat.
2. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan.
3. Jadwal keberangkatan yang tidak menentu.

- **Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4640 – Penunjang Teknis Transportasi Darat dengan nomenklatur 524111 – Sosialisasi BPTD.

Nilai Pagu untuk Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 Sebesar **Rp. 169.211.00,-**

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. 169.211.000,-** (100%). Dari Total Pagu **Rp. 169.211.000,-**

b.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk setiap terminal sebagai pedoman pengembangan yang terarah dan terukur.
2. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan masterplan pengembangan yang telah ditetapkan.

b.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

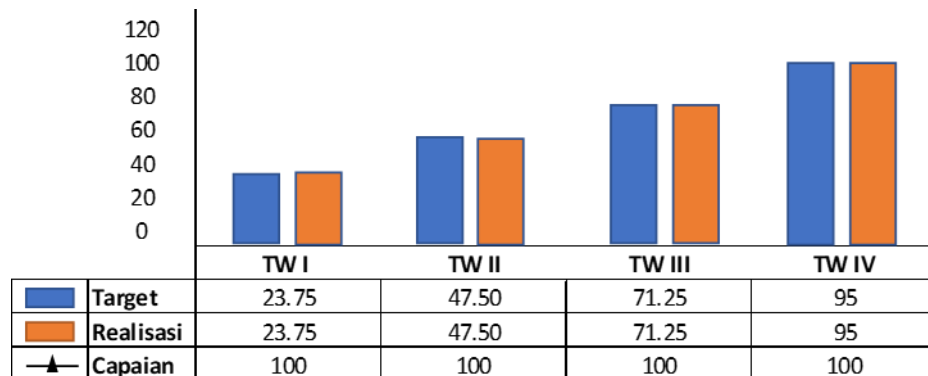
Realisasi kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 95% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 tetap sebesar 95% maka capaian kinerja mencapai 95%. untuk rincian capaian pada Tahun ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 5 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020,2021,2022,2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A																	
1	IKK 2.1	90	90	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	Tetap

b.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 95% maka capaian kinerja mencapai 95%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART di Terminal Tipe A

b.2.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan perbandingan Realisasi Kinerja SMART Terminal Tipe-A dengan Target Kinerja Pencapaian SMART Terminal Tipe-A. Untuk menghitung Presentasi Pelaksanaan Penerapan SMART Tipe-A dapat menggunakan rumus berikut:

$$IKK\ 2.2 = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

Saat ini Terminal Tipe-A Yang ada di Provinsi Gorontalo, masih dalam tahap pengembangan untuk bisa melayani pembelian tiket secara online dan juga pembangunan mal pelayanan publik yang bakal nantinya akan di bangun di area terminal.



b.2.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo

Realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART di Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 95%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Penerapan SMART di Terminal Tipe A

Grafik III.6 Persentase penerapan SMART di terminal Tipe-A.

b.2.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan data aset, penerapan SMART Terminal Tipe-A yang sudah berjalan hingga Tahun 2024 ialah sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) terminal.

Berdasarkan PP RI No.43 tahun 1993 Terminal penumpang Tipe A, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Terminal penumpang Tipe B, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES). Capaian Penerapan SMART di terminal Tipe-A sesuai target dan realisasi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (95)}}{\text{Target (95)}} \times 95\% = 95\%$$

Dengan demikian, keberhasilan Indikator Kinerja Penerapan SMART di terminal Tipe-A sebesar 95%

- **Faktor Keberhasilan**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Terlaksananya kegiatan sesuai SOP dan aturan yang ada.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

- **Faktor Kegagalan**

1. Belum bisa melayani pembelian tiket secara online.
2. Pengelolaan data produksi kendaraan masih secara manual.
3. Sarana dan prasarana masih kurang memadai.

- **Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4640 – Penunjang Teknis Transportasi Darat dengan nomenklatur 524111 – Perjalanan Dinas (Monev).



Nilai Pagu untuk Kegiatan Penerapan SMART di terminal Tipe-A Tahun 2024 Sebesar **Rp. 169.211.000,-**

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Penerapan SMART di terminal Tipe-A Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. 169.211.000,-** (100%). Dari Total Pagu **Rp. 169.211.000,-**

b.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Akan meningkatkan persentase pelayanan yang ada di terminal
2. Menyusun dan menetapkan rencana induk setiap terminal sebagai pedoman pengembangan yang terarah dan terukur.
3. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan masterplan pengembangan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengembangan sistem aplikasi pembelian tiket secara online dan pengelolaan data produksi.

b.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

Persentase pelaksanaan Penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 95% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 capaian kinerja mencapai 95%. untuk rincian capaian pada Tahun 2020,2021,2022 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

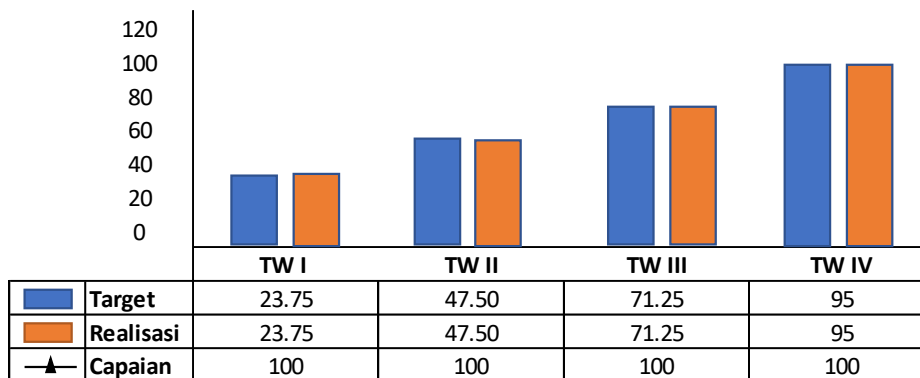
Tabel III. 6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020,2021,2022,2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A																	
1	IKK 2.2	90	90	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	Tetap

b.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024

Realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada tahun 2020 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 capaian kinerja mencapai 95%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.





Gambar III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penerapan SMART di Terminal Tipe A Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan

SDP

b.3.1. Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

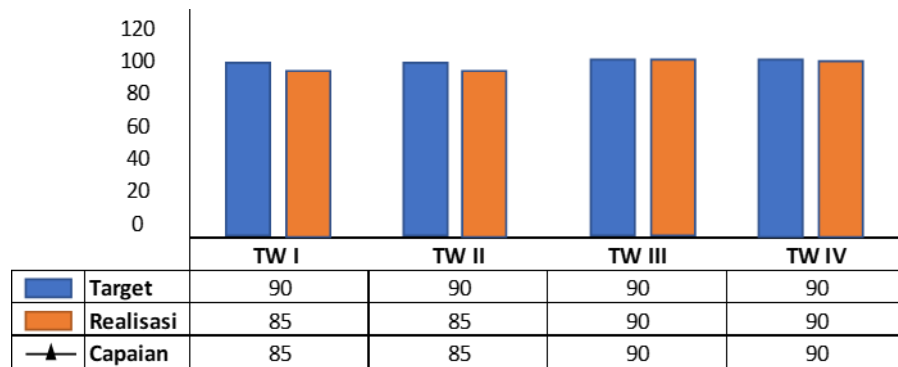
Untuk menghitung persentase Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dapat menggunakan rumus berikut :

$$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

b.3.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan tahun 2024 sebesar 90%. Pencapaian ini digambarkan

pada Grafik Capaian IKK Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan



Grafik III.7 Capaian IKK Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan

b.3.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan minimal. untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan, perlu disusun standar pelayanan minimal. Balai Pengelola transportasi Darat Kelas II Gorontalo melakukan pengawasan SPM pada setiap pelabuhan penyeberangan perintis dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4550/AP.204/DRJD/2019 tanggal 4 November 2019 Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2020, sebanyak 253 lintas ditetapkan untuk dilayani Angkutan Penyeberangan Perintis. Dari jumlah lintas tersebut terdapat 123 (seratus dua puluh tiga) lintas penyeberangan yang melayani 39 (tiga puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional.

Capaian Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Sesuai rencana pada Tahun 2022, pelaksanaan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP di Provinsi Gorontalo sebanyak 2 lokasi. Pelaksanaan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP yang telah terlaksana adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 90\% = 90\%$$

Dengan demikian, keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 90%

- **Faktor Keberhasilan**

1. Telah terlaksananya pelayanan sesuai SOP.
2. Terpenuhinya beberapa fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan.



3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target dan capaian yang diinginkan.

- **Faktor Kegagalan**

1. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengoperasional.
2. Fasilitas yang belum memadai.
3. Tidak adanya perubahan mengenai hasil setelah dilakukannya Standar Pelayanan Minimum (SPM).

- **Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4640 – Penunjang Teknis Transportasi Darat dengan nomenklatur 524111 – Perjalanan Dinas Monitoring TSDP.

Nilai Pagu untuk Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 Sebesar **Rp. 169.211.00,-**

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. 169.211.00,-** (100%).

b.3.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan standar pelayanan minimum (SPM).
2. Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasana yang memadai.
3. Menyusun dan menetapkan rencana induk sebagai pedoman pengembangan yang terarah dan terukur.

b.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

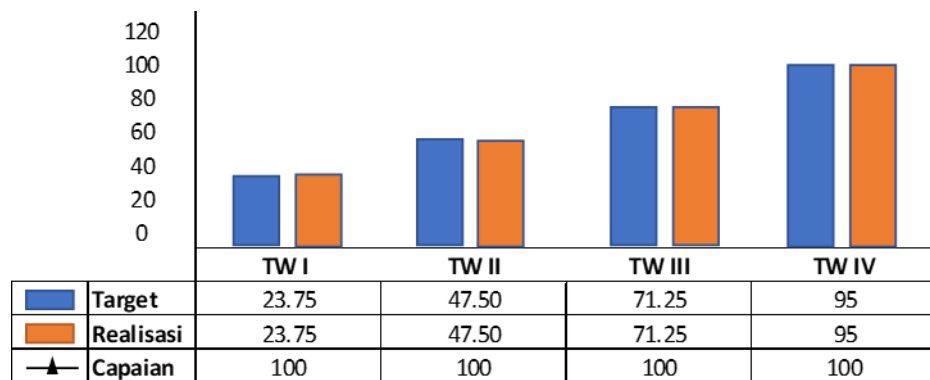
Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebesar 90% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 capaian kinerja mencapai 90%. untuk rincian capaian pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 7 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020,2021,2022,2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP																	
1	IKK 2.3	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Tetap

b.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 capaian kinerja mencapai 90%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.7 Perbandingan Realisasi Kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo adalah dengan mewujudkan



pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
2. IKK 3.2. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
3. IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan
4. IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif
5. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
6. IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*
7. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
8. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP

IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

c.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal berdasarkan perbandingan layanan dan fasilitas transportasi darat pada kawasan prioritas nasional terhadap jumlah total kawasan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 10 (sepuluh) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 10 (sepuluh) item dimaksud meliputi:

1. Guardrail
2. Warning Light
3. Cermin Tikung
4. R P P J (F)
5. R P P J Portal
6. L P J U
7. Rambu Jalan
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
9. Delineator Pipa Besi
10. Marka Jalan

Keterangan:

Perlengkapan Jalan Yang Sudah Terpasang Sampai Dengan Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Gorontalo :

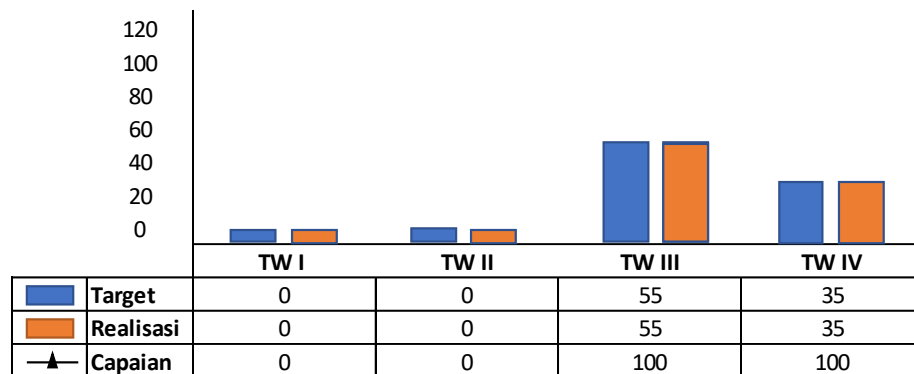
PERLENGKAPAN JALAN YANG TERPASANG												
NO	NAMA RUAS	TAHUN PENGADAAN	Guardrail (Meter)	Warning Light (Unit)	Cermin Tikungan (Buah)	RPPJ F (Buah)	RPPJ PORTAL (Buah)	LPJU (Unit)	RAMBU JALAN	TRAFFIC LIGHT (SET)	DELINEATOR PIPA BESI	MARKA JALAN (Meter)
1	RUAS JALAN NASIONAL PROVINSI GORONTALO	2017	428	4	6	2	0	197	1399	1	1534	0
2		2018	0	0	0	0	5	191	0	5	0	24.93
3		2019	1.08	8	49	0	0	111	366	2	0	0
4		2020	420	4	7	0	2	137	0	6	0	20380
5		2021	720	0	0	0	0	45	608	7	0	0
6		2022	820	24	0	0	0	33	441	0	0	0
7		2023	472	10	0	6	0	111	591	1	331	33000
JUMLAH			2861.08	50	62	8	7	825	3405	22	1865	53404.93

Untuk menghitung Indikator Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpasang}}{\text{Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan}} \times 100\%$$

c.1.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Capaian kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.



Grafik III.8 Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

c.1.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Dasar Hukum yang mengacu pada pelaksanaan kegiatan yaitu Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan dalam Pasal 22.

- 1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- 2) Perlengkapan jalan terdiri atas perlengkapan yang berkaitan langsung dan berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan.

Capaian Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Sesuai rencana pada Tahun 2024, Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal di wilayah Provinsi Gorontalo sebanyak 55% Pada Triwulan IV Tahun 2024. Dan 35% dilaksanakan pada Triwulan IV. Maka capaian realisasi terhadap kegiatan Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang 100%.



- **Faktor Keberhasilan**

1. Telah terlaksananya proses lelang dan penandatanganan kontrak kerja secara bertahap dari pihak penyedia.
2. Meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target dan capaian yang diinginkan.

- **Faktor Kegagalan**

1. Adanya kendala cuaca dan kondisi alam yang mempengaruhi proses pemasangan perlengkapan jalan.
2. Mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman barang.
3. Hanya beberapa item yang terpasang dalam pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Provinsi Gorontalo.

- **Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4639 – Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat
Nilai Pagu untuk Monev Kegiatan Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2023 Sebesar **Rp. 169.211.000,-**

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Monev Perlengkapan Jalan Yang Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. 169.211.000,-** (100%). Dari Total Pagu **Rp. 169.211.000,-**

c.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pengadaan bahan perlengkapan jalan sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan yang ada.
2. Pengadaan bahan perlengkapan jalan sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan yang tertera pada peraturan direktorat jenderal perhubungan darat.
3. Menyusun dan menetapkan rencana induk sebagai pedoman pengembangan yang terarah dan terukur.

c.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

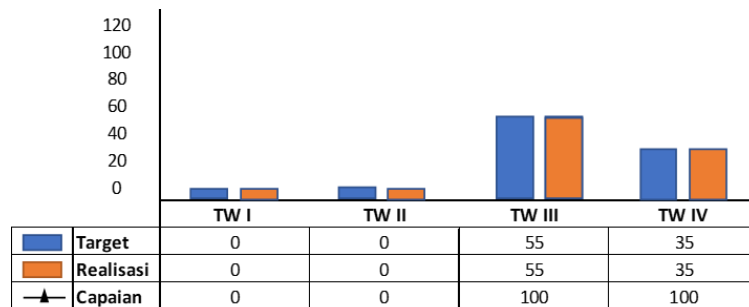
Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 90% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 capaian kinerja mencapai 90%. untuk rincian capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020,2021,2022,2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal																	
1	IKK 3.1	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Tetap

c.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024

Capaian Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 capaian kinerja mencapai 90%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

c.2.1 Definisi Indikator Kinerja

Dasar Hukum terkait kegiatan UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (Satpel UPPKB) adalah unit kerja dibawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan pengoperasian Fasilitas Penimbangan. Fasilitas penimbangan adalah fasilitas



penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang (PM 18 Tahun 2021). Adapun fungsi UPPKB adalah untuk melakukan fungsi pencatatan, pengawasan dan penindakan angkutan barang terhadap :

1. Tata cara pemuatan barang.
2. Dimensi kendaraan angkutan barang.
3. Penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang.
4. Dokumen angkutan barang.
5. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa.
6. Jenis barang yang di angkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

UPPKB yang beroperasi di wilayah Provinsi Gorontalo yaitu :

1. UPPKB Marisa
2. UPPKB Molotabu

Persentase Pelanggaran pada UPPKB yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo berdasarkan data yang ada pada setiap pelaporan yang ada di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa.

$$IKK\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah Kendaraan Barang Yang Melakukan Pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan Yang Masuk Pada UPPKB}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah Kendaraan yang ditimbang sampai dengan triwulan IV tahun 2024:

UPPKB Molotabu : 11.224

UPPKB Marisa : 20.332

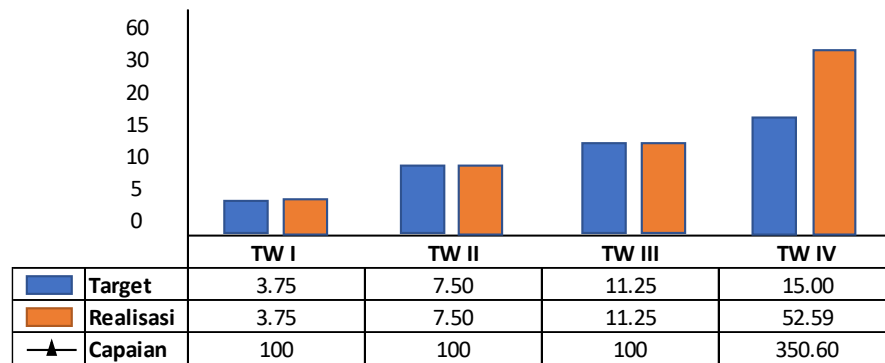
Jumlah Kendaraan yang melanggar sampai dengan triwulan IV tahun 2024:

UPPKB Molotabu : 1.965

UPPKB Marisa : 14.630

c.2.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo tahun 2024

Capaian kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan IV 2024 sebesar 52.59% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sebesar 15%. Naik sebesar 13.63% dari yang di targetkan. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Grafik III.9 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

c.2.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan UPPKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan. Untuk persentase pelanggaran yang ada di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa mengalami kenaikan sampai dengan Triwulan IV di tahun 2024 sebesar 52.59%, di tahun berikutnya akan di maksimalkan jumlah kendaraan yang melanggar.

- Faktor Keberhasilan**

1. Telah terlaksananya kegiatan sesuai SOP dan aturan yang ada.
2. Penyebarluasan informasi melalui media social atau website terkait dengan proses penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di UPPKB.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target dan capaian yang diinginkan.

- Faktor Kegagalan**

1. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengoperasional.
2. Fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai.
3. Perusahaan yang memiliki kendaraan angkutan barang selalu tidak mentaati aturan-aturan yang ada.

- Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4639 – Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat
Nilai Pagu untuk Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 Sebesar **Rp. 2.747.925.000,-**

- Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. 2.747.925.000,-** (100%).



c.2.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan

datang yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk sebagai pedoman pengembangan yang terarah dan terukur.
2. Melakukan sosialisasi lagi kepada pengemudi yang belum paham tentang aturan kendaraan angkutan barang.
3. Akan meningkatkan kompetensi SDM agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
4. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait.

c.2.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

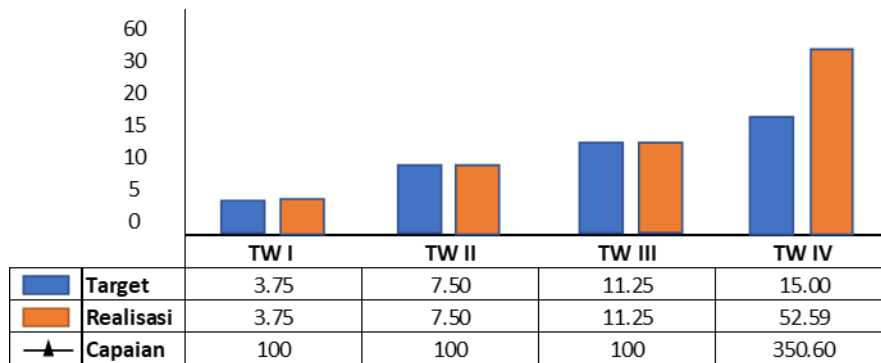
Realisasi kinerja persentase Pelanggaran pada UPPKB rata-rata sebesar 52.59% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 naik sebesar 13.63% maka capaian kinerja mencapai 350.60%. untuk rincian capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 9 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020,2021,2022,2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat																	
1	IKK 3.2	40	40	40	20	20	20	15	38.96	259.73	15	52.59	350.60	15	52.59	350.60	Naik 13.63%

c.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024

Realisasi kinerja Pelanggaran pada UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa pada tahun 2023 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 naik sebesar 13.63% maka capaian kinerja mencapai 350.60%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas

Kecepatan

c.3.1 Definisi Indikator Kinerja

Zona Selamat Sekolah (ZOSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.

Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan. Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 3582/AJ. 403/DRDJ/2018 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan Dan Kenyamanan Pejalan Kaki Pada Kawasan Sekolah.

Bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, telah diatur ketentuan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki dalam bentuk penyediaan Zona Selamat Sekolah.

Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah lokasi di ruas jalan tertentu yang merupakan zona kecepatan berbasis waktu untuk mengatur kecepatan kendaraan di lingkungan sekolah. Pelaksanaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) merupakan salah satu bentuk manajemen lalu lintas dalam rangka pemenuhan rasa aman dalam menyeberang jalan bagi Pejalan Kaki. Penerapannya adalah pada ruas jalan di area sekolah yang memiliki lalu lintas pejalan kaki anak sekolah cukup



tinggi dan rentan kecelakaan lalu lintas. Fasilitas Perlengkapan jalan pada Zona Selamat Sekolah berupa Marka Jalan dan Rambu-rambu Lalu Lintas.

Keterangan:

- Adanya revisi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga tidak adanya progress capaian kinerja untuk kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, dan Batas Kecepatan.

c.3.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Belum adanya capaian dan realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, dan Batas Kecepatan. Karena ada revisi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

c.3.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Belum adanya analisis keberhasilan dan kegagalan terhadap realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, dan Batas Kecepatan. Karena ada revisi Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Untuk menghitung kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, dan Batas Kecepatan sesuai target dan realisasi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (0)}}{\text{Target (15)}} \times 100\% = 0\%$$

- **Faktor Keberhasilan**
 - a. Belum Adanya Faktor Keberhasilan
- **Faktor Kegagalan**
 - a. Belum Adanya Faktor Kegagalan
- **Penganggaran berdasarkan POK**
 - b. Belum Adanya Penganggaran
- **Realisasi Anggaran**
 - a. Belum Adanya Realisasi Anggaran



c.3.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk sebagai pedoman pengembangan yang terarah dan terukur.
2. Melakukan Pemeliharaan / Perawatan secara berkala terhadap Fasilitas ZoSS yang sudah ada.
3. Melakukan pendataan kembali sekolah-sekolah untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS, dan Batas Kecepatan yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo.

c.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

Realisasi kinerja ketersediaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 100% untuk tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024. Dan untuk tahun 2024 untuk kegiatan ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan. untuk rincian capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan																	
1	IKK 3.3	0	0	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Terlaksana

c.3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024

Untuk tahun 2024 belum adanya perbandingan realisasi kinerja untuk kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan.

IKK 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif

c.4.1 Definisi Indikator Kinerja

Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif yang tercantum di Perjanjian Kinerja Bptd Kelas II Gorontalo Tahun 2024 belum adanya capaian kinerja karena didalam Renstra Ditjen Hubdat 2020-2024 untuk kegiatan tersebut belum di anggarkan.



c.4.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Belum adanya perbandingan realisasi dan target kinerja untuk Ketersediaan Taman Edukatif.

c.4.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Belum adanya analisa keberhasilan/kegagalan untuk kegiatan Ketersediaan Taman Edukatif.

c.4.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk tahun 2023 kegiatan untuk Ketersediaan Taman Edukatif. belum adanya capaian dimasa yang akan datang.

c.4.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

Belum adanya perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja.

c.4.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024

Belum adanya perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja.

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

c.5.1 Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

Kegiatan tersebut dititik beratkan kepada para generasi muda pengguna jalan (Young Road Users) mengingat bahwa generasi muda pengguna jalan merupakan kelompok beresiko tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini. Tema yang diangkat dari tiap penyelenggaraan Kegiatan Pekan Keselamatan Transportasi Jalan tersebut berbeda-beda dan pada tahun 2016 yang lalu, tema yang diangkat yaitu Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Bersama. Tema tersebut diaplikasikan dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Ke Sekolah dan Masyarakat. Dalam Kegiatan tersebut akan diberikan pemahaman mendasar mengenai

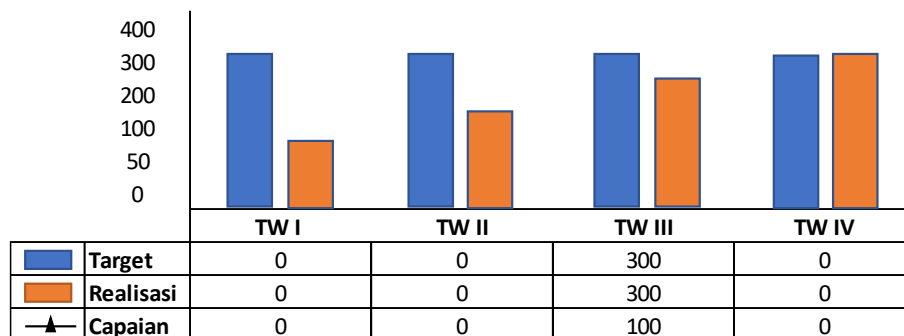
pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Hasil dari kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada publik tentang pentingnya arti keselamatan dan bagaimana cara berperilaku yang selamat di jalan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan tingkat keparahan korban kecelakaan.

Tempat pelaksanaan sosialisasi yang di laksanakan :

1. Sekolah
2. Lokasi Kerja
3. Seluruh Satuan Pelayanan Yang Ada di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Prov. Gorontalo

c.5.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 300 orang jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar 300 orang maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2022



Grafik III.10 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

c.5.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan bagian empat tentang budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan pasal 208, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo telah melaksanakan sosialisasi keselamatan jalan.

Untuk menghitung kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan sesuai target dan realisasi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (300 org)}}{\text{Target (300 org)}} = 100\%$$



Dengan demikian, keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan yaitu sebesar 300 orang.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Telah terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat.
2. Penyebarluasan informasi melalui media social atau website terkait dengan berlalu lintas yang baik dan benar.
3. Mempunyai dampak baik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran diri berlalu lintas.

- **Faktor Kegagalan**

1. Minimnya kesadaran diri masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.
2. Masih kurangnya pemasangan rambu-rambu lintas di titik yang rawan kecelakaan.
3. Sebagian masyarakat yang mengendarai kendaraan tidak memiliki dokumen yang lengkap.

- **Penganggaran berdasarkan POK**

anggaran 4639 – Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat dengan nomenklatur 051 - Pekan Nasional Keselamatan Jalan

Total Nilai Pagu untuk Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 Sebesar
Rp. 300.000.000,-

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. 350.000.000,-** (100%). Dari Total Pagu
Rp. 350.000.000,-

c.5.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi secara periodik yang telah di amanatkan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan disesuaikan dengan



- anggaran yang telah di anggarkan pada pagu anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo
2. Diharapkan kedepannya Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan dapat bertambah dari jumlah target sebelumnya dan berjalan sesuai dengan yang sudah di tetapkan.
 3. Mengusulkan penambahan rambu-rambu lalu lintas di titik rawan kecelakaan.

c.5.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

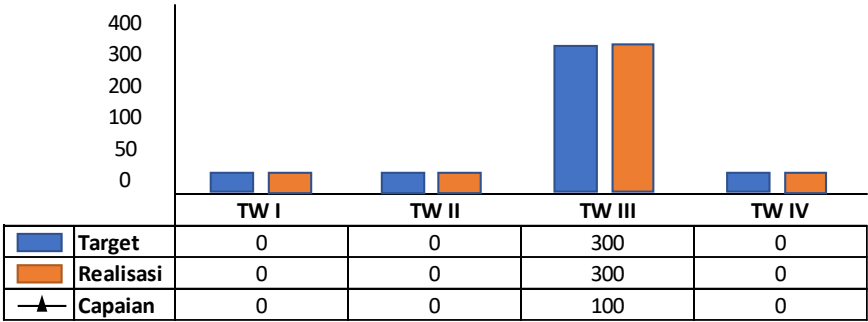
Persentase masyarakat yang sudah tersosialisasi hingga triwulan IV tahun 2024 sebesar 100% atau sejumlah 300 orang jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: untuk rincian capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 11 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020,2021,2022,2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan																	
1	IKK 3.5	600	600	100	720	720	100	300	300	100	300	300	100	300	300	100	Terlaksana

c.5.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024

Realisasi kinerja masyarakat yang sudah tersosialisasi tentang keselamatan transportasi sebesar 100% untuk tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024



IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

c.7.1 Definisi Indikator Kinerja

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Uji berkala kendaraan bermotor wajib uji.
- b. Uji emisi kendaraan bermotor.

Ada beberapa item yang wajib diperiksa dalam menguji kelaikan kendaraan. Seperti uji emisi, join play, lampu, side slep, rem dan speedometer. Termasuk ketebalan ban dan klakson. Joni menegaskan, pemeriksaan berkala itu penting dilakukan untuk memastikan kelaikan kendaraan.

Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar (Perdirjen No. KP.1954/AJ502/DRJD/2019). Serta dalam melaksanakan tugas BPTD salah satu fungsi diantaranya yaitu pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor (PM 154 Tahun 2016). Sebagaimana tertuang dalam PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 167 Ayat (1) menjelaskan bahwa untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali. Selain itu kalibrasi wajib dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sebagai syarat sahnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor sehingga hasil dari pengujian kendaraan bermotor dapat di pertanggungjawabkan. Proses pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan dari permohonan pengajuan kalibrasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Setelah itu diterbitkannya billing pembayaran kalibrasi yang kemudian penjadwalan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor.

$$IKK\ 3.6 = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda} + \text{Jumlah UPUBKB Swasta}} \times 100\%$$

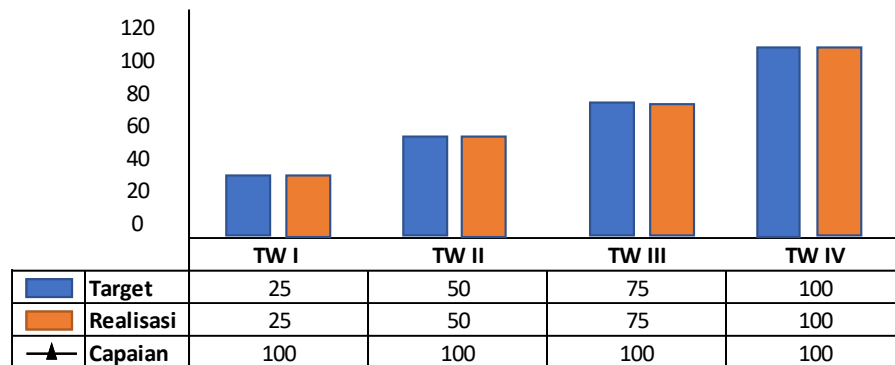
Keterangan:

Tempat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor :

1. Kota Gorontalo
2. Kab. Bone Bolango
3. Kab. Gorontalo
4. Kab. Gorontalo Utara
5. Kab. Boalemo
6. kab. Pohuwato

c.7.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Gorontalo Tahun 2024

Capaian Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 100%.



Grafik III.12 Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

c.7.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan. Mekanisme kendaraan yang wajib uji, diharuskan uji kir setiap 6 bulan, salah satu tugas kami adalah menguji kondisi ban dan kendaraan, faktor rem juga mempengaruhi kelayakan, lampu pun juga harus berfungsi. Salah satu faktor yang paling menunjang keberhasilan dari pengujian kendaraan bermotor ialah sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk menghitung kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sesuai target dan realisasi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (100)}}{\text{Target (100)}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 100%.

• Faktor Keberhasilan

1. Peningkatan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan angkutan umum di daerah melalui Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).
2. Adanya bantuan Sarana Pengujian kendaraan Bermotor berupa mobil Uji Keliling dari Kementerian melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.



3. informasi melalui media social atau website terkait dengan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
4. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan di uji.

- **Faktor Kegagalan**

1. Tidak adanya Pengembangan teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor.
2. Kurangnya SDM yang tersedia untk melaksanakan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji.
3. Minimnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dana prasarana.
4. Pengelolaan data pengujian masih secara manual.

- **Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4640 – Penunjang Teknis Transportasi Darat (O – Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB) dengan nomenklatur 524111 – Perjalanan Dinas.

Nilai Pagu untuk Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 Sebesar **Rp. 200.000.000,-**

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. 200.000.000,-** (100%). Dari Total Pagu **Rp. 200.000.000,-**

c.7.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu:

1. Memastikan dan mengupayakan unit pengujian kendaraan bermotor telah menggunakan alat uji yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga kendaraan bermotor dapat diuji secara akurat demi keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
2. Menjaga/memelihara sarana dan prasarana yang baik.
3. Melakukan sosialisasi terhadap pengemudi kendaraan angkutan barang dengan adanya kartu uji elektronik (e-blue).

c.7.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

Realisasi kinerja terhadap Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sudah mencapai 100% jika dibandingkan dengan target

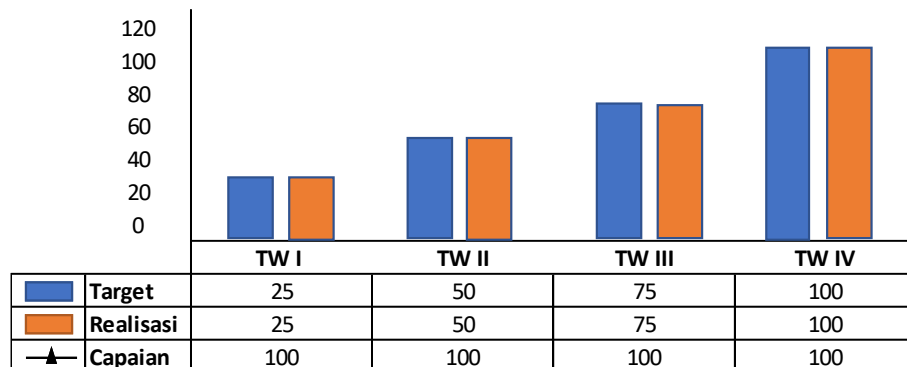
PK Tahun 2024.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk rincian capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020,2021,2022,2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor																	
1	IKK 7a	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tetap	

c.7.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor di 6 tempat/lokasi pengujian kendaraan bermotor sebesar 100% untuk tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2043 dalam Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

c.8.1 Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau. Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP merupakan salah satu indikator penting dalam rangka terjaminnya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur pelayaran sungai



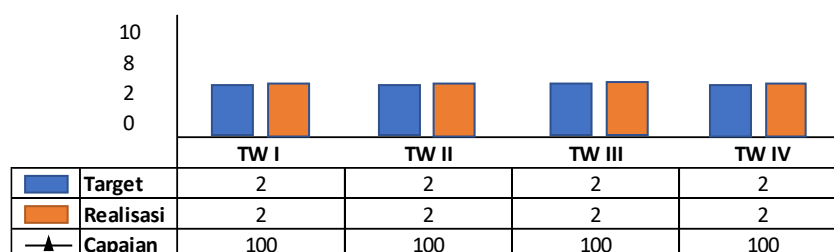
dan danau. Salah satu kegiatan yang ada pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo adalah kegiatan pengadaan dan pemasangan rambu sungai pada daerah aliran sungai yang ada pada wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo. Rambu sungai adalah fasilitas berupa tanda-tanda dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka dan/atau perpaduan diantaranya yang dapat berupa papan berwarna atau pelampung dan/atau isyarat sinar yang digunakan untuk memberikan larangan, perintah, petunjuk, dan peringatan bagi pemakai alur- pelayaran sungai.

IKK 7.b = Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun (n)

c.8.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas Gorontalo Tahun 2024

Realisasi kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 2 lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 2 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.

Jumlah Pelabuhan SDP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo Yang Beroperasi sampai dengan saat ini tetap 2 Lokasi.



Grafik III.13 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP

c.8.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 25 tahun 2011 tentang sarana bantu navigasi pelayaran, Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Gorontalo memiliki fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sehingga terjaminnya keselamatan, keamanan, ketertiban alur pelayaran.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan.

Untuk menghitung kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, keberhasilan Indikator Kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP yaitu sebesar 100%.

- **Faktor Keberhasilan**

1. Pelaksanaan kegiatan Berdasarkan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
2. Penyebarluasan informasi melalui media social atau website terkait dengan Alur Pelayaran SDP.
3. Monitoring kegiatan secara berkala, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target pelaksanaan dan capaian yang diinginkan.

- **Faktor Kegagalan**

1. Kurangnya SDM yang tersedia dalam melakukan pengoperasional.
2. Minimnya anggaran untuk pemeliharaan sarana dana prasarana.
3. Pengelolaan data produksi masih secara manual.

- **Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4640 – Penunjang Teknis Transportasi Darat

Nilai Pagu untuk Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Tahun 2023 Sebesar

Rp. 169.211.000,-

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. 169.211.000,-**

c.8.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk setiap pelabuhan sebagai pedoman pengembangan yang terarah dan terukur.
2. Mengusulkan rencana Pembangunan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota kepada Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.



3. Melaksanakan monitoring pengawasan secara berkala oleh tim teknis seksi sarana prasarana.

c.8.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

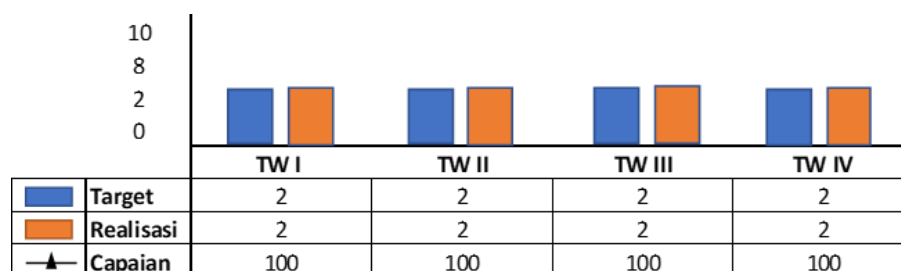
Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. untuk rincian capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 13 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020,2021,2022 dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP																	
1	IKK 7b	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100	Tetap

c.8.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat

yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

d.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dihitung berdasarkan penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan di lakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Integrasi Perencanaan (40%), Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran KL (40%) dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah (20%).

Keterangan:

Aspek Penilaian :

- a. Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat
- b. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
- c. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Transportasi Darat

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut :



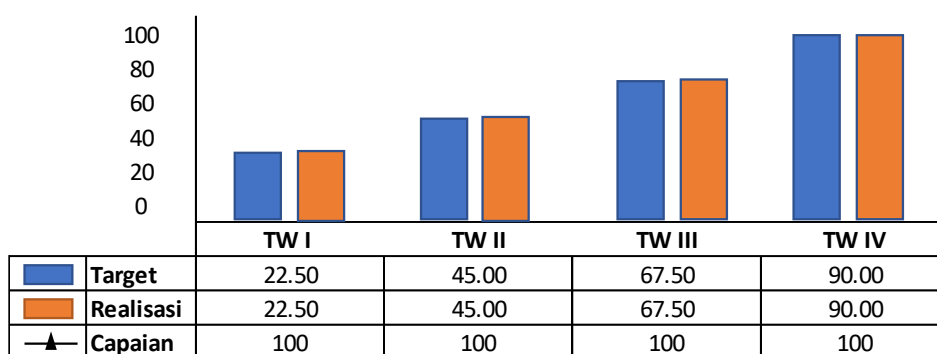
Keterangan :

kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri atas 4 aspek :

- Aspek perencanaan
- Aspek kepegawaian
- Aspek keuangan
- Penyelenggaraan perkantoran

d.1.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 dengan nilai sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.



Grafik III.14 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

d.1.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Teknis Dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.

Capaian Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100%.

Untuk menghitung kegiatan Jumlah Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

- Faktor Keberhasilan**



1. Pelaksanaan kegiatan Berdasarkan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Teknis Dalam Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat.
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target pelaksanaan dan capaian yang diinginkan.
3. Terpenuhinya beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

- **Faktor Kegagalan**

1. Keterbatasan jumlah SDM dalam memaksimalkan kegiatan.
2. Hanya beberapa item yang terpasang dalam pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Provinsi Gorontalo.
3. Pengumpulan data dukung penyusunan dokumen SAKIP ataupun Laporan Kinerja Bulanan dari setiap seksi atau satuan pelayanan sering kali mengalami keterlambatan.

- **Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4639 – Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat dengan nomenklatur:

- 051 – Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. **Rp. 1.503.144.000,-**
- 051 – Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional. **Rp. 15.976.301.000,-**
- 052 – Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan. **Rp. 1.376.670.000,-**
- 053 – Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK). **Rp. 1.168.670.000,-**

Total Nilai Pagu untuk Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 Sebesar **Rp. 20.024.785.000,-**

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. Rp. 20.024.785.000,-** (100%). Dari Total Pagu **Rp. 20.024.785.000,-**

d.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Menyusun dan menetapkan rencana induk setiap pelabuhan sebagai pedoman pengembangan yang terarah dan terukur.
2. Melaksanakan monitoring pengawasan secara berkala oleh tim teknis seksi sarana prasarana.



3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dukungan teknis sesuai dengan anggaran yang tersedia agar realisasi anggaran untuk penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target.

d.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

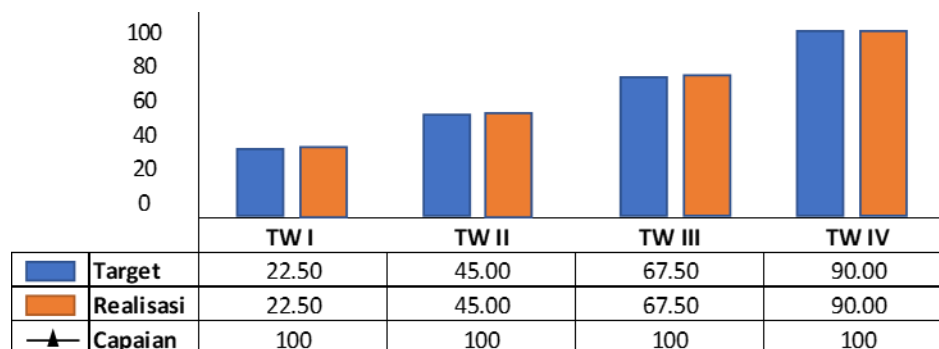
Realisasi kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2024. untuk rincian capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.14 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021,2022,2023, dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat																	
1	IKK 5.1	85	85	100	90	90	100	90	100	100	90	100	100	90	100	100	Tetap

d.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

e.1.1 Definisi Indikator Kinerja

Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dihitung berdasarkan penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan di lakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Integrasi Perencanaan (40%), Sikronisasi Perencanaan dan Penganggaran KL (40%) dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah (20%). Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Indeks Reformasi Birokrasi digunakan rumus sebagai berikut:

Proses perumusan meliputi:

1. Aspek Penilaian;
2. Pembobotan Nilai;
3. Parameter;
4. Jumlah responden (*sampling metode*).

Keterangan:

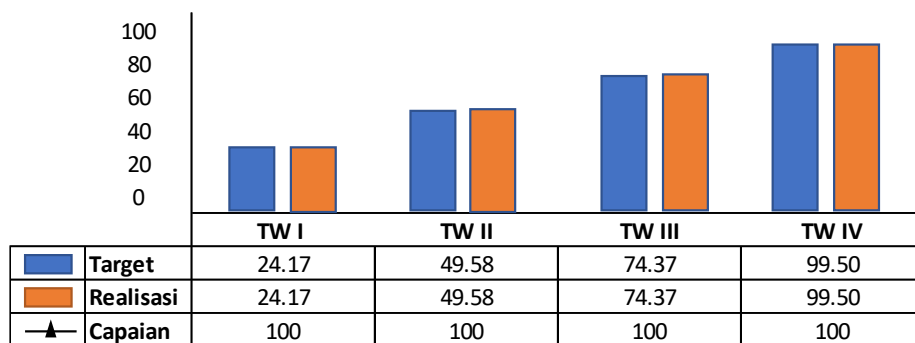
1. Aspek Penilaian:
 - a. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan Darat



- b. Indeks Kelembagaan Ditjen Perhubungan Darat
- c. Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Perhubungan Darat
- d. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Ditjen Perhubungan Darat
- e. Nilai SAKIP Ditjen Perhubungan Darat
- f. Indeks Pengawasan Kearsipan Ditjen Perhubungan Darat
- g. Indeks Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Darat
- h. Indeks Perencanaan Ditjen Perhubungan Darat
- i. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen Perhubungan Darat
- j. Indeks Pengelolaan Keuangan Ditjen Perhubungan Darat
- k. Indeks Pengelolaan Aset Ditjen Perhubungan Darat
- l. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
- m. Indeks Kepemimpinan Perubahan Ditjen Perhubungan Darat
- n. Reputasi Positif Ditjen Perhubungan Darat
- o. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Transportasi Darat

e.1.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 dengan nilai sebesar 99.50% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.



Grafik III.15 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

e.1.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), di arahkan dalam empat strategi :

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan system merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan nasional.
2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis melalui : penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui : perluasan implementasi system integrasi, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi system perencanaan dan penganggaran.
4. Transformasi pelayanan public melalui : pelayanan public berbasis elektronik (e-service), penguatan ekosistem inovasi dan penguatan pelayanan terpadu.

Untuk menghitung kegiatan Jumlah Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = 100\%$$

• **Faktor Keberhasilan**

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta nasional ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan nasional.
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target pelaksanaan dan capaian yang diinginkan.
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui : perluasan implementasi sistem integrasi, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi sistem perencanaan dan penganggaran beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

• **Faktor Kegagalan**

1. Keterbatasan jumlah SDM dalam memaksimalkan kegiatan.
2. Jaringan internet sering menjadi kendala pada saat Penginputan data di aplikasi atau website.
3. Pengumpulan data dukung penyusunan dokumen SAKIP ataupun Laporan Kinerja Bulanan dari setiap seksi atau satuan pelayanan sering kali mengalami keterlambatan.



- **Penganggaran berdasarkan POK**

Anggaran 4640 – Penunjang Teknis Transportasi Darat

- Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan **Rp. 4.014.970.000,-**

Anggaran 4670 – Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat

- Layanan Perkantoran **Rp. 6.849.747.000,-**

Anggaran 4671 – Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum

- Layanan Perkantoran **Rp. 12.636.838.000,-**

Total Nilai Pagu untuk Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 Sebesar **Rp. 23.501.555.000,-**

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi untuk Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV Sebesar **Rp. 23.501.555.000,-** 100%) Dari Total Pagu **Rp.23.501.555.000,-**

e.1.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan Tinggi untuk lebih mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat.
2. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat

e.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2020,2021,2022,2023, dan Tahun 2024

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 99.50% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 90%.Jadi realisasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0.34% dari tahun sebelumnya. untuk rincian capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

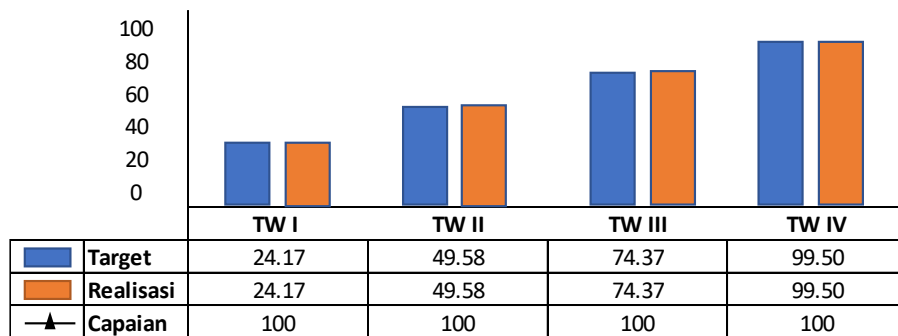
Tabel III. 18 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021,2022,2023, dan Tahun 2024



No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Naik/Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
IKK 6.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat																	
1	IKK 6.1	85	85	100	90	90	100	90	99.16	100	90	99.50	100	90	99.50	100	Naik 0.34%

e.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 99.50% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 sebesar 90% maka capaian kinerja mencapai 100%. Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024.



Gambar III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Draft Renstra Ditjen Hubdat Tahun 2020-2024

III. 3. REALISASI ANGGARAN

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp. 74.093.065.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

a.1. Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	74.093.065.000
PNBP	Rp.	-
SBSN	Rp.	-
Total	Rp.	74.093.065.000

a.2. Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.
Belanja Barang	Rp.
Belanja Modal	Rp.
Total	Rp.



Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat TA. 2024 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar **Rp.79.838.578.000,-** Sehingga Total Pagu akhir DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat pada Triwulan IV TA. 2024 adalah sebesar **Rp.79.838.578.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

▪ Rincian per Sumber Dana:

RM	Rp.	78.971.374.000	95.60
PNBP	Rp.	867.204.000	99.90
SBSN	Rp.	-	-
Total	Rp.	79.838.578.000	95.65

▪ Rincian per Jenis Belanja:

Belanja Pegawai	Rp.	16.506.880.000	99.97
Belanja Barang	Rp.	41.602.292.000	91.90
Belanja Modal	Rp.	21.729.406.000	99.54
Total	Rp.	79.838.578.000	95.65

III.3.1.2 Refocussing Anggaran Tahun 2024

a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	74.093.065.000	-	-	74.093.065.000
REVISI KE-1	76.842.686.000	-	-	76.842.686.000
REVISI KE-2	79.171.374.000	-	-	79.171.374.000
REVISI KE-3	79.838.578.000	-	-	79.838.578.000

a.2. Rincian Revisi per Jenis Belanja

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	12.636.838.000	40.006.170.000	21.450.057.000	74.093.065.000
REVISI KE-1	14.164.359.000	41.603.375.000	21.074.952.000	76.842.686.000
REVISI KE-2	16.506.880.000	41.589.542.000	21.074.952.000	79.171.374.000
REVISI KE-3	16.506.880.000	41.602.292.000	21.729.406.000	79.838.578.000

a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja :

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	12.636.838.000	-	16.506.880.000
Belanja Barang	40.006.170.000	-	39.054.728.000
· RM	-	-	-
· PNBP	-	-	-



Belanja Modal	21.450.057.000	-	21.729.406.000
· RM	-	-	-
· PNBP	-	-	-
· SBSN	-	-	-
TOTAL	74.093.065.000	-	79.838.578.000

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

NOMENKLATUR KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	PAGU AKHIR (Rp.) PER TRIWULAN IV
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo	74.093.065.000	-	79.838.578.000
Program Infrastruktur Konektivitas	25.917.786.000	-	55.583.085.000
Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	21.557.984.000	-	21.544.151.000
Pelayanan Transportasi Darat	6.773.494.000	-	7.837.198.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	21.902.816.000	-	22.186.766.000
Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.014.970.000	-	4.014.970.000
Program Dukungan Manajemen	19.486.585.000	-	23.898.277.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.849.747.000	-	7.391.397.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	12.636.838.000	-	16.506.880.000

III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020–2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020–2024

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	47.534.109.000	73.040.307.000	72.701.264.166	99.54



2	2021	77.562.644.000	55.866.306.000	55.365.517.941	99.10
3	2022	50.901.597.000	49.881.073.000	49.766.610.353	99.77
4	2023	67.936.514.000	67.179.241.000	66.841.083.343	99.50
5	2024	74.093.065.000	79.838.578.000	76.362.106.966	95.54

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan

III.3.1.4 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2024 yang sudah di analisis per Triwulan IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024

No	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
		Rp. (Rp.,-)	Rp. (Rp.,-)	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 16.506.880.000	Rp. 16.502.118.015	99.97
2	Belanja Barang	Rp. 41.602.292.000	Rp. 38.230.817.951	91.90
3	Belanja Modal	Rp. 21.729.406.000	Rp. 21.629.171.000	99.54
TOTAL		Rp. 79.838.578.000	Rp. 76.362.106.966	95.65

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 95.65%

III.3.1.5 Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data Sisa Anggaran Kegiatan Kontraktual Tahun 2024 dan Capaian Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, per sumber dana dan sisa anggaran tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Sisa Anggaran Kegiatan Kegiatan Tahun 2024

No	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	16.506.880.000	16.502.118.015	4.761.985
2	Belanja Barang	41.602.292.000	38.230.817.951	3.371.420.049
3	Belanja Modal	21.729.406.000	21.629.171.000	100.235.000
TOTAL		79.838.578.000	76.362.106.966	3.476.417.034

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan



Tabel Sisa Anggaran Per Sumber Dana Sampai Degan Triwulan IV Tahun 2024

No	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	78.971.374.000	75.495.747.278	3.475.626.722
2	PNBP	867.204.000	866.359.688	844.312
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		79.838.578.000	76.362.106.966	3.474.782.410

Sumber: Data diolah dari Bagian Keuangan

III.3.1.6 Hambatan dan Kendala

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo capai kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 tidak terlalu mengalami hambatan kendala yang terlalu signifikan, berbeda dengan Tahun 2020 sampai dengan 2022 dimana pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan seperti banyak pekerjaan yang mengalami kemunduran jadwal pelaksanaan karena pembatasan aktivitas, dll. Pada Tahun 2024 ini memang kita masih dihadapkan dengan kondisi pandemi namun berkaca pada pengalaman pada tahun sebelumnya kita relatif masih bisa mengantisipasi kondisi serta beberapa kemungkinan terburuk yang terjadi. Namun pada akhirnya, kami Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo dapat menuntaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi target kinerja sampai dengan Triwulan IV ini maupun pencapaian realisasi anggaran yang cukup memuaskan.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

IV PENUTUP

IV. Penutup

IV.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 ini terdapat 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat tahun 2024. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - A. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sudah terealisasi 100%.
 - B. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi 100% di 2 lokasi.
 - C. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terealisasi 100%.
 - D. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 100% di 2 lokasi.
 - E. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A terealisasi 95%.
 - F. Persentase penerapan SMART terminal tipe-A terealisasi 95%
 - G. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi 90%.
 - H. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 100%.





- I. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat masih sebanyak 38.96%.
 - J. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum terealisasi karena adanya automatic adjustment (A.A)
 - K. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 100%
 - L. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)* terealisasi 100% pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
 - M. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 100%.
 - N. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terealisasi 100% di 2 lokasi.
 - O. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi 100%.
 - P. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 99.50 %.
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
 3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident dan zero odol.





IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	2	2	Tercapai	Memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan jalan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik kepada masyarakat	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	Tercapai	Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan yang telah disusun;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	2	2	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	95	95	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan jalan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	95	95	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	90	90	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
3	SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	90	90	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DitjenPerhubungan Darat	%	15	15	15	Tercapai	Melakukan sosialisasi kepada perusahaan angkutan barang terhadap muatan yang sesuai JBI yang sudah ditetapkan di setiap kendaraan.	- Seksi PJSDP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	300	300	Tercapai	Untuk mewujudkan tertib lalu lintas, sangat diperlukan adanya komitmen di tengah-tengah masyarakat, pelajar dan stakeholder untuk mematuhi rambu-rambu dalam berlalu lintas, sehingga dengan demikian akan melahirkan tertib lalu lintas dan kecelakaan dalam berlalu lintas akan dapat diminimalisir.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	2	2	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP
4	SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	90	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	99	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN I

RENCANA KINERJA TAHUNAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO**

2024



RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO
TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	6
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	2
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Gorontalo, 02 Januari 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo



DOMINGGUS, S.T.,M.T
NIP. 19671015 199803 1 004



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO**

2024





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dominggus, S.T.,M.T

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M

Gorontalo, 02 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo

DOMINGGUS, S.T.,M.T
NIP. 19671015 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuaistandar internasional (UN-ECE)	Unit	6
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	2
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan:

		Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 21.557.984.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 6.773.494.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 21.902.816.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.014.970.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 357.216.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.849.747.000
7.	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 12.636.838.000
Total		Rp. 74.093.065.000

Gorontalo, 02 Januari 2024

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo



DOMINGGUS, S.T., M.T
NIP. 19671015 199803 1 004



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN III

Revisi I

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO**

2024





REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dominggus, S.T.,M.T

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K
NRP. 66110433

Gorontalo, 18 Juli 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo

DOMINGGUS, S.T.,M.T
NIP. 19671015 199803 1 004

REVISI I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan:

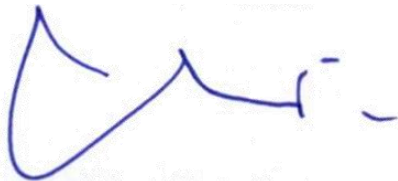
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	21.557.984.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	6.773.494.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	21.902.816.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	4.014.970.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	357.216.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	6.849.747.000
7.	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	14.164.359.000

Total**Rp. 75.620.586.000**

Gorontalo, 18 Juli 2024

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K
NRP. 66110433

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo

DOMINGGUS, S.T., M.T
NIP. 19671015 199803 1 004



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN IV

Revisi II

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO**

2024





REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulmardi A.TD.,M.M

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 30 September 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K
NRP. 66110433

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo

ZULMARDI, A.TD.,M.M
NIP. 19680317 199103 1 002

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

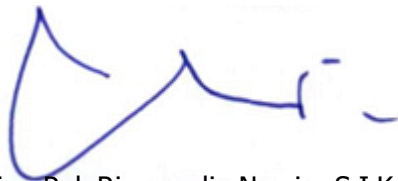
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan:

		Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 21.544.151.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 7.169.994.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 22.186.766.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.014.970.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 357.216.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 7.391.397.000
7.	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 16.506.880.000
Total		Rp. 79.171.374.000

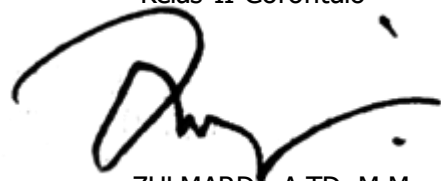
Gorontalo, 30 September 2024

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K
NRP. 66110433

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo



ZULMARDI, A.TD., M.M
NIP. 19680317 199103 1 002



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN V

Revisi III

PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO**

2024





REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulmardi A.T.D.,M.M

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D.,M.T

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 02 Desember 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Ahmad Yani, A.T.D.,M.T
NIP. 19650930 199003 1 003

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo

ZULMARDI, A.T.D.,M.M
NIP. 19680317 199103 1 002

REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
SK 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK 4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

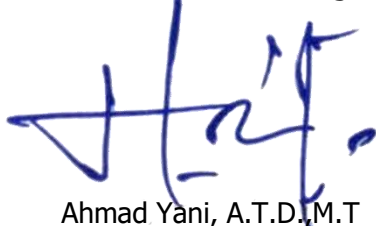
Kegiatan:

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	21.544.151.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	7.837.198.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	22.186.766.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	4.014.970.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	357.216.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	7.391.397.000
7.	Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	16.506.880.000

Total**Rp. 79.838.578.000**

Gorontalo, 02 Desember 2024

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Ahmad Yani, A.T.D., M.T
NIP. 19650930 199003 1 003

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo



ZULMARDI, A.T.D., M.M
NIP. 19680317 199103 1 002



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN VI

RENCANA AKSI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II GORONTALO**

2024





RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp 5,200,279,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 2,476,014,000	- Seksi PJSDP
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp 16,357,705,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 2,297,480,000
2	SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal	7.92	15.83	23.75	31.67	39.58	47.50	55.42	63.33	71.25	79.17	87.08	95	Rp 29,846,000	- Seksi PJSDP
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan di Lingkungan Terminal	7.92	15.83	23.75	31.67	39.58	47.50	55.42	63.33	71.25	79.17	87.08	95	Rp 29,846,000	- Seksi PJSDP
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monev Pelaksanaan SPM di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Marisa	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 29,846,000	- Seksi PJSDP
3	SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Monev Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang di Seluruh Wilayah Provinsi Gorontalo	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 29,846,000	- Seksi LLJSDPP
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15	Operasional UPPKB dan Pengawasan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melanggar di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	1.25	2.50	3.75	5.00	6.25	7.50	8.75	10.00	11.25	12.50	13.75	15	Rp 2,463,975,000	- Seksi PJSDP
			IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Anggarannya Masih Dikenakan Automatic Adjusment)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp -	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	Rp 350,000,000	- Seksi SAJSDP
			IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev Fasilitas Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Rp 29,846,000	- Seksi SAJSDP
			IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB Secara Berkala	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp 200,000,000	- Seksi SAJSDP
			IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Sarana dan Prasarana di Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp 29,846,000	- Seksi LLJSDPP
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan, Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK), Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 21,066,981,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Layanan Perkantoran BPTD dan Pemantauan Evaluasi Serta Pelaporan	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 23,501,555,000	- Subag. Tata Usaha

Gorontalo, 02 Januari 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
 Kelas II Gorontalo



DOMINGGUS, S.T.,M.T

NIP. 19671015 199803 1 004



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

KELAS II GORONTALO



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN VII



REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp 5,200,279,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 2,697,514,000	- Seksi PJSDP
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp 16,343,872,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 2,472,480,000	- Seksi PJSDP
2	SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal	7.92	15.83	23.75	31.67	39.58	47.50	55.42	63.33	71.25	79.17	87.08	95	Rp 169,211,000	- Seksi PJSDP
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan di Lingkungan Terminal	7.92	15.83	23.75	31.67	39.58	47.50	55.42	63.33	71.25	79.17	87.08	95	Rp 169,211,000	- Seksi PJSDP
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monev Pelaksanaan SPM di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Marisa	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 169,211,000	- Seksi PJSDP
3	SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Monev Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang di Seluruh Wilayah Provinsi Gorontalo	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 169,211,000	- Seksi LLJSDPP
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15	Operasional UPPKB dan Pengawasan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melanggar di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	1.25	2.50	3.75	5.00	6.25	7.50	8.75	10.00	11.25	12.50	13.75	15	Rp 2,747,925,000	- Seksi PJSDP
			IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Anggarannya Masih Dikenakan Automatic Adjustment)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp -	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	Rp 350,000,000	- Seksi SAJSDP
			IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB Secara Berkala	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp 200,000,000	- Seksi SAJSDP
			IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Sarana dan Prasarana di Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp 169,211,000	- Seksi LLJSDPP
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan, Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK), Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 21,066,981,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Layanan Perkantoran BPTD dan Pemantauan Evaluasi Serta Pelaporan	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 27,913,247,000	- Subag. Tata Usaha

Gorontalo, 18 Juli 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo



DOMINGGUS, S.T.,M.T

NIP. 19671015 199803 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN VIII



REVISI II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp 5,200,279,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 2,697,514,000	- Seksi PJSDP
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp 16,343,872,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 2,472,480,000	- Seksi PJSDP
2	SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal	7.92	15.83	23.75	31.67	39.58	47.50	55.42	63.33	71.25	79.17	87.08	95	Rp 169,211,000	- Seksi PJSDP
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan di Lingkungan Terminal	7.92	15.83	23.75	31.67	39.58	47.50	55.42	63.33	71.25	79.17	87.08	95	Rp 169,211,000	- Seksi PJSDP
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monev Pelaksanaan SPM di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Marisa	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 169,211,000	- Seksi PJSDP
3	SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Monev Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang di Seluruh Wilayah Provinsi Gorontalo	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 169,211,000	- Seksi LLJSDPP
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15	Operasional UPPKB dan Pengawasan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melanggar di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	1.25	2.50	3.75	5.00	6.25	7.50	8.75	10.00	11.25	12.50	13.75	15	Rp 2,747,925,000	- Seksi PJSDP
			IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Anggarannya Masih Dikenakan Automatic Adjustment)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp -	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12			
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	Rp	350,000,000	- Seksi SAJSDP
			IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB Secara Berkala	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp	200,000,000	- Seksi SAJSDP
			IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Sarana dan Prasarana di Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp	169,211,000	- Seksi LLJSDPP
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan, Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK), Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp	21,066,981,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Layanan Perkantoran BPTD dan Pemantauan Evaluasi Serta Pelaporan	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp	27,913,247,000	- Subag. Tata Usaha

Gorontalo, 30 September 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo



DOMINGGUS, S.T.,M.T

NIP. 19671015 199803 1 004



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN IX



DRAFT REVISI III RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp 5,200,279,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 2,697,514,000	- Seksi PJSDP
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp 16,343,872,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Rp 2,472,480,000	- Seksi PJSDP
2	SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal	7.92	15.83	23.75	31.67	39.58	47.50	55.42	63.33	71.25	79.17	87.08	95	Rp 169,211,000	- Seksi PJSDP
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan di Lingkungan Terminal	7.92	15.83	23.75	31.67	39.58	47.50	55.42	63.33	71.25	79.17	87.08	95	Rp 169,211,000	- Seksi PJSDP
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monev Pelaksanaan SPM di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Marisa	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 169,211,000	- Seksi PJSDP
3	SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Monev Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang di Seluruh Wilayah Provinsi Gorontalo	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 169,211,000	- Seksi LLJSDPP
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	15	Operasional UPPKB dan Pengawasan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Yang Melanggar di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	1.25	2.50	3.75	5.00	6.25	7.50	8.75	10.00	11.25	12.50	13.75	15	Rp 2,747,925,000	- Seksi PJSDP
			IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Anggarannya Masih Dikenakan Automatic Adjusment)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rp -	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
								Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	Rp 350,000,000	- Seksi SAJSDP
			IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB Secara Berkala	8.33	16.67	25.00	33.33	41.67	50.00	58.33	66.67	75.00	83.33	91.67	100	Rp 200,000,000	- Seksi SAJSDP
			IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Sarana dan Prasarana di Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp 169,211,000	- Seksi LLJSDPP
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan, Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK), Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 21,066,981,000	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Layanan Perkantoran BPTD dan Pemantauan Evaluasi Serta Pelaporan	7.50	15.00	22.50	30.00	37.50	45.00	52.50	60.00	67.50	75.00	82.50	90	Rp 27,913,247,000	- Subag. Tata Usaha

Gorontalo, 18 November 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Gorontalo



[Handwritten Signature]

ZULMARDI, A.TD.,M.M
NIP. 19680317 199103 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN X



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN JANUARI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-1				REALISASI BULAN-1				% CAPAIAN BULAN-1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	8.33	100	Rp 433,356,583	100	8.33	100	Rp 433,356,583	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2	100	Rp 206,334,500	100	2	100	Rp 206,334,500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	8.33	100	Rp 1,363,142,083	100	8.33	100	Rp 1,363,142,083	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2	100	Rp 191,456,667	100	2	100	Rp 191,456,667	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	7.92	100	Rp 2,487,167	100	7.92	100	Rp 2,487,167	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	7.92	100	Rp 2,487,167	100	7.92	100	Rp 2,487,167	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	7.50	100	Rp 2,487,167	100	7.50	100	Rp 2,487,167	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	7.50	100	Rp 2,487,167	100	7.50	100	Rp 2,487,167	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Diijen/Perhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	1.25	100	Rp 205,331,250	100	1.25	100	Rp 205,331,250	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Belum adanya capaian kinerja	0	0	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Menunggu informasi lanjut dari bagian keuangan Ditjen Hubdat Kemenhub	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0	0	Rp 29,166,667	0	100	0	Rp 29,166,667	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNE-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6	100	Rp 2,487,167	100	6	100	Rp 2,487,167	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPPKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	8.33	100	Rp 16,666,667	100	8.33	100	Rp 16,666,667	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2	100	Rp 2,487,167	100	2	100	Rp 2,487,167	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-1				REALISASI BULAN-1				% CAPAIAN BULAN-1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	7.50	100	Rp 1,755,581,750	100	7.50	100	Rp 1,755,581,750	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	7.50	100	Rp 1,958,462,917	100	7.50	100	Rp 1,958,462,917	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN FEBRUARI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-2				REALISASI BULAN-2				% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	16.66	100	Rp 866,713,167	100	16.66	100	Rp 866,713,167	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 412,669,000	100	2	100	Rp 412,669,000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	16.66	100	Rp 2,726,284,167	100	16.66	100	Rp 2,726,284,167	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 382,913,333	100	2	100	Rp 382,913,333	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	15.84	100	Rp 4,974,333	100	15.84	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	15.84	100	Rp 4,974,333	100	15.84	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	15.00	100	Rp 4,974,333	100	15.00	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	15.00	100	Rp 4,974,333	100	15.00	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiIjen/Perhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	2.50	100	Rp 410,662,500	100	2.50	100	Rp 410,662,500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Belum adanya capaian kinerja	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Menunggu informasi lanjut dari bagian keuangan DiIjen Hubdat Kemenhub	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp 58,333,333	0	100	0	Rp 58,333,333	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 4,974,333	100	6	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUKKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	16.66	100	Rp 33,333,333	100	16.66	100	Rp 33,333,333	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 4,974,333	100	2	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-2				REALISASI BULAN-2				% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	15.00	100	Rp 3.511.163.500	100	15.00	100	Rp 3.511.163.500	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	15.00	100	Rp 3.916.925.833	100	15.00	100	Rp 3.916.925.833	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN MARET TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-3				REALISASI BULAN-3				% CAPAIAN BULAN-3		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	24.99	100	Rp 1.300.069.750	100	24.99	100	Rp 1.300.069.750	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 619.003.500	100	2	100	Rp 619.003.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	24.99	100	Rp 4.089.426.250	100	24.99	100	Rp 4.089.426.250	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 574.370.000	100	2	100	Rp 574.370.000	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 7.461.500	100	23.76	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 7.461.500	100	23.76	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	22.50	100	Rp 7.461.500	100	22.50	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	22.50	100	Rp 7.461.500	100	22.50	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiIjen/Perhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	3.75	100	Rp 615.993.750	100	3.75	100	Rp 615.993.750	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Belum adanya capaian kinerja	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Menunggu informasi lanjut dari bagian keuangan DiIjen Hubdat Kemenhub	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp 87.500.000	0	100	0	Rp 87.500.000	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 7.461.500	100	6	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPPKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	24.99	100	Rp 50.000.000	100	24.99	100	Rp 50.000.000	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 7.461.500	100	2	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-3				REALISASI BULAN-3				% CAPAIAN BULAN-3		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	22.50	100	Rp 5,266,745,250	100	22.50	100	Rp 5,266,745,250	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	22.50	100	Rp 5,875,388,750	100	22.50	100	Rp 5,875,388,750	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN APRIL TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-4				REALISASI BULAN-4				% CAPAIAN BULAN-4		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	24.99	100	Rp 1,733,426,333	100	24.99	100	Rp 1,733,426,333	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 825,338,000	100	2	100	Rp 825,338,000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	24.99	100	Rp 5,452,568,333	100	24.99	100	Rp 5,452,568,333	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 765,826,667	100	2	100	Rp 765,826,667	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 9,948,667	100	23.76	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 9,948,667	100	23.76	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	22.50	100	Rp 9,948,667	100	22.50	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	22.50	100	Rp 9,948,667	100	22.50	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiIjenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	3.75	100	Rp 821,325,000	100	3.75	100	Rp 821,325,000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Belum adanya capaian kinerja	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Menunggu informasi lanjut dari bagian keuangan DiIjen Hubdat Kemenhub	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp 116,666,667	0	100	0	Rp 116,666,667	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 9,948,667	100	6	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPPKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	24.99	100	Rp 66,666,667	100	24.99	100	Rp 66,666,667	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 9,948,667	100	2	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-4				REALISASI BULAN-4				% CAPAIAN BULAN-4		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	22.50	100	Rp 7,022,327,000	100	22.50	100	Rp 7,022,327,000	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	22.50	100	Rp 7,833,851,667	100	22.50	100	Rp 7,833,851,667	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN MEI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-5				REALISASI BULAN-5				% CAPAIAN BULAN-5		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	24.99	100	Rp 2.166,782,917	100	24.99	100	Rp 2.166,782,917	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 1.031,672,500	100	2	100	Rp 1.031,672,500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	24.99	100	Rp 6,815,710,417	100	24.99	100	Rp 6,815,710,417	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 957,283,333	100	2	100	Rp 957,283,333	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 12,435,833	100	23.76	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 12,435,833	100	23.76	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	22.50	100	Rp 12,435,833	100	22.50	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	22.50	100	Rp 12,435,833	100	22.50	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPKKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	15	3.75	100	Rp 1,026,656,250	100	3.75	100	Rp 1,026,656,250	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp -	0	100	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 12,435,833	100	6	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	24.99	100	Rp 83,333,333	100	24.99	100	Rp 83,333,333	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 12,435,833	100	2	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-5				REALISASI BULAN-5				% CAPAIAN BULAN-5		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	22.50	100	Rp 8,777,908,750	100	22.50	100	Rp 8,777,908,750	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	22.50	100	Rp 9,792,314,583	100	22.50	100	Rp 9,792,314,583	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN JUNI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6				% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	24.99	100	Rp 2.600.139.500	100	24.99	100	Rp 2.600.139.500	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 1.238.007.000	100	2	100	Rp 1.238.007.000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	24.99	100	Rp 8.178.852.500	100	24.99	100	Rp 8.178.852.500	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 1.148.740.000	100	2	100	Rp 1.148.740.000	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 14.923.000	100	23.76	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 14.923.000	100	23.76	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	22.50	100	Rp 14.923.000	100	22.50	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	22.50	100	Rp 14.923.000	100	22.50	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	3.75	100	Rp 1.231.987.500	100	3.75	100	Rp 1.231.987.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp -	0	100	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 14.923.000	100	6	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	24.99	100	Rp 100.000.000	100	24.99	100	Rp 100.000.000	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 14.923.000	100	2	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6				% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	22.50	100	Rp 10,533,490,500	100	22.50	100	Rp 10,533,490,500	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	22.50	100	Rp 11,750,777,500	100	22.50	100	Rp 11,750,777,500	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN JULI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-7				REALISASI BULAN-7				% CAPAIAN BULAN-7		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	24.99	100	Rp 3.033,496,083	100	24.99	100	Rp 3.033,496,083	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 1.444,341.500	100	2	100	Rp 1.444,341.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	24.99	100	Rp 9,541,994.583	100	24.99	100	Rp 9,541,994.583	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 1.340,196,667	100	2	100	Rp 1.340,196,667	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 17,410,167	100	23.76	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 17,410,167	100	23.76	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	22.50	100	Rp 17,410,167	100	22.50	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	22.50	100	Rp 17,410,167	100	22.50	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	3.75	100	Rp 1,437,318,750	100	3.75	100	Rp 1,437,318,750	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp -	0	100	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNE-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 17,410,167	100	6	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPPKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	24.99	100	Rp 116,666,667	100	24.99	100	Rp 116,666,667	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 17,410,167	100	2	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-7				REALISASI BULAN-7				% CAPAIAN BULAN-7		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	22.50	100	Rp 12,289,072,250	100	22.50	100	Rp 12,289,072,250	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	22.50	100	Rp 13,709,240,417	100	22.50	100	Rp 13,709,240,417	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN AGUSTUS AHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8				% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	KK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	66.64	100	Rp 3,466,852,667	100	66.64	100	Rp 3,466,852,667	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur.	Seksi LLJSDPP Seksi SAJSDP
			KK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Bimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 1,650,676,000	100	2	100	Rp 1,650,676,000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala
		KK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	66.64	100	Rp 10,905,136,667	100	66.64	100	Rp 10,905,136,667	100	100	100	Tercapai	Berkordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	Seksi LLJSDPP Seksi SAJSDP
			KK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 1,531,653,333	100	2	100	Rp 1,531,653,333	100	100	100	Tercapai	Berkordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	KK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Bimu	95	63.36	100	Rp 19,897,333	100	63.36	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Bimu	Seksi PJSDP
			KK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Bimu	95	63.36	100	Rp 19,897,333	100	63.36	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Panwala
		KK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	60.00	100	Rp 19,897,333	100	60.00	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	Seksi PJSDP
			KK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	60.00	100	Rp 19,897,333	100	60.00	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	KK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	10.00	100	Rp 1,642,650,000	100	10.00	100	Rp 1,642,650,000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	Seksi PJSDP
			KK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan
		KK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp -	0	100	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Laku Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada threulan 3	Seksi SAJSDP
		KK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 19,897,333	100	6	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	Seksi SAJSDP
			KK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPPKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	66.64	100	Rp 133,333,333	100	66.64	100	Rp 133,333,333	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian etek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada
		KK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 19,897,333	100	2	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8				% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	KK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	60.00	100	Rp 14,044,654,000	100	60.00	100	Rp 14,044,654,000	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Digen Perhubungan Darat Akuntabel	KK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Digen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran BPTD	90	60.00	100	Rp 15,667,703,333	100	60.00	100	Rp 15,667,703,333	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Digen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9				% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	74.97	100	Rp 3.900.209.250	100	74.97	100	Rp 3.900.209.250	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 1.857.010.500	100	2	100	Rp 1.857.010.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	74.97	100	Rp 12.268.278.750	100	74.97	100	Rp 12.268.278.750	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 1.723.110.000	100	2	100	Rp 1.723.110.000	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	71.28	100	Rp 22.384.500	100	71.28	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	71.28	100	Rp 22.384.500	100	71.28	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	67.50	100	Rp 22.384.500	100	67.50	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	67.50	100	Rp 22.384.500	100	67.50	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	11.25	100	Rp 1.847.981.250	100	11.25	100	Rp 1.847.981.250	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	300.00	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 semuanya berjalan dengan baik dan lancar	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	9.00	100	Rp 22.384.500	100	9	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	74.97	100	Rp 150.000.000	100	74.97	100	Rp 150.000.000	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 22.384.500	100	2	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9				% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	67.50	100	Rp 15,800,235,750	100	67.50	100	Rp 15,800,235,750	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	67.50	100	Rp 17,626,166,250	100	67.50	100	Rp 17,626,166,250	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN OKTOBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-10				REALISASI BULAN-10				% CAPAIAN BULAN-10		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	83.30	100	Rp 4.333.565.833	100	83.30	100	Rp 4.333.565.833	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 2.063.345.000	100	2	100	Rp 2.063.345.000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	83.30	100	Rp 13.631.420.833	100	83.30	100	Rp 13.631.420.833	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 1.914.566.667	100	2	100	Rp 1.914.566.667	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	79.20	100	Rp 24.871.667	100	79.20	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	79.20	100	Rp 24.871.667	100	79.20	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	75.00	100	Rp 24.871.667	100	75.00	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	75.00	100	Rp 24.871.667	100	75.00	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPKKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	15	12.50	100	Rp 2.053.312.500	100	12.50	100	Rp 2.053.312.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	300.00	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 semuanya berjalan dengan baik dan lancar	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 24.871.667	100	6	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	83.30	100	Rp 166.666.667	100	83.30	100	Rp 166.666.667	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 24.871.667	100	2	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-10				REALISASI BULAN-10				% CAPAIAN BULAN-10		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	75.00	100	Rp 17,555,817,500	100	75.00	100	Rp 17,555,817,500	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	75.00	100	Rp 19,584,629,167	100	75.00	100	Rp 19,584,629,167	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-11				REALISASI BULAN-11				% CAPAIAN BULAN-11		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	91.63	100	Rp 4.766.922.417	100	91.63	100	Rp 4.766.922.417	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSOP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 2.269.679.500	100	2	100	Rp 2.269.679.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	91.63	100	Rp 14.994.562.917	100	91.63	100	Rp 14.994.562.917	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSOP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 2.106.023.333	100	2	100	Rp 2.106.023.333	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	87.12	100	Rp 27.358.833	100	87.12	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	87.12	100	Rp 27.358.833	100	87.12	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	82.50	100	Rp 27.358.833	100	82.50	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	82.50	100	Rp 27.358.833	100	82.50	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPKKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	15	13.75	100	Rp 2.258.643.750	100	13.75	100	Rp 2.258.643.750	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	300.00	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 semuanya berjalan dengan baik dan lancar	- Seksi SAJSOP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNE-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 27.358.833	100	6	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSOP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUKKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	91.63	100	Rp 183.333.333	100	91.63	100	Rp 183.333.333	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSOP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 27.358.833	100	2	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-11				REALISASI BULAN-11				% CAPAIAN BULAN-11		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	82.50	100	Rp 19,311,399,250	100	82.50	100	Rp 19,311,399,250	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	82.50	100	Rp 21,543,092,083	100	82.50	100	Rp 21,543,092,083	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN DESEMBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-12				REALISASI BULAN-12				% CAPAIAN BULAN-12		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	99.96	100	Rp 5.200.279.000	100	99.96	100	Rp 5.200.279.000	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 2.476.014.000	100	2	100	Rp 2.476.014.000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	99.96	100	Rp 16.357.705.000	100	99.96	100	Rp 16.357.705.000	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 2.297.480.000	100	2	100	Rp 2.297.480.000	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	95.04	100	Rp 29.846.000	100	95.04	100	Rp 29.846.000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	95.04	100	Rp 29.846.000	100	95.04	100	Rp 29.846.000	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	90.00	100	Rp 29.846.000	100	90.00	100	Rp 29.846.000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	90.00	100	Rp 29.846.000	100	90.00	100	Rp 29.846.000	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPKKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	15	15.00	100	Rp 2.463.975.000	100	15.00	100	Rp 2.463.975.000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	300.00	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 semuanya berjalan dengan baik dan lancar	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNE-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 29.846.000	100	6	100	Rp 29.846.000	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUKKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	99.96	100	Rp 200.000.000	100	99.96	100	Rp 200.000.000	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 29.846.000	100	2	100	Rp 29.846.000	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-12				REALISASI BULAN-12				% CAPAIAN BULAN-12		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	90.00	100	Rp 21,066,981,000	100	90.00	100	Rp 21,066,981,000	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	90.00	100	Rp 23,501,555,000	100	90.00	100	Rp 23,501,555,000	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN JANUARI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-1				REALISASI BULAN-1				% CAPAIAN BULAN-1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	8.33	100	Rp 433.356.583	100	8.33	100	Rp 433.356.583	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2	100	Rp 206.334.500	100	2	100	Rp 206.334.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	8.33	100	Rp 1.363.142.083	100	8.33	100	Rp 1.363.142.083	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2	100	Rp 191.456.667	100	2	100	Rp 191.456.667	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	7.92	100	Rp 2.487.167	100	7.92	100	Rp 2.487.167	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	7.92	100	Rp 2.487.167	100	7.92	100	Rp 2.487.167	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	7.50	100	Rp 2.487.167	100	7.50	100	Rp 2.487.167	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	7.50	100	Rp 2.487.167	100	7.50	100	Rp 2.487.167	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiIjen/Perhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	1.25	100	Rp 205.331.250	100	1.25	100	Rp 205.331.250	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Belum adanya capaian kinerja	0	0	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Menunggu informasi lanjut dari bagian keuangan DiIjen Hubdat Kemenhub	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0	0	Rp 29.166.667	0	100	0	Rp 29.166.667	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6	100	Rp 2.487.167	100	6	100	Rp 2.487.167	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPPKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	8.33	100	Rp 16.666.667	100	8.33	100	Rp 16.666.667	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2	100	Rp 2.487.167	100	2	100	Rp 2.487.167	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-1				REALISASI BULAN-1				% CAPAIAN BULAN-1		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	7.50	100	Rp 1,755,581,750	100	7.50	100	Rp 1,755,581,750	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	7.50	100	Rp 1,958,462,917	100	7.50	100	Rp 1,958,462,917	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN FEBRUARI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-2				REALISASI BULAN-2				% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	16.66	100	Rp 866,713,167	100	16.66	100	Rp 866,713,167	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 412,669,000	100	2	100	Rp 412,669,000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	16.66	100	Rp 2,726,284,167	100	16.66	100	Rp 2,726,284,167	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 382,913,333	100	2	100	Rp 382,913,333	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	15.84	100	Rp 4,974,333	100	15.84	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	15.84	100	Rp 4,974,333	100	15.84	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	15.00	100	Rp 4,974,333	100	15.00	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	15.00	100	Rp 4,974,333	100	15.00	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Diijen/Perhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	2.50	100	Rp 410,662,500	100	2.50	100	Rp 410,662,500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Belum adanya capaian kinerja	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Menunggu informasi lanjut dari bagian keuangan Ditjen Hubdat Kemenhub	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp 58,333,333	0	100	0	Rp 58,333,333	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNE-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 4,974,333	100	6	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	16.66	100	Rp 33,333,333	100	16.66	100	Rp 33,333,333	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 4,974,333	100	2	100	Rp 4,974,333	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-2				REALISASI BULAN-2				% CAPAIAN BULAN-2		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	15.00	100	Rp 3.511.163.500	100	15.00	100	Rp 3.511.163.500	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	15.00	100	Rp 3.916.925.833	100	15.00	100	Rp 3.916.925.833	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN MARET TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-3				REALISASI BULAN-3				% CAPAIAN BULAN-3		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	24.99	100	Rp 1.300.069.750	100	24.99	100	Rp 1.300.069.750	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 619.003.500	100	2	100	Rp 619.003.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	24.99	100	Rp 4.089.426.250	100	24.99	100	Rp 4.089.426.250	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 574.370.000	100	2	100	Rp 574.370.000	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 7.461.500	100	23.76	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 7.461.500	100	23.76	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	22.50	100	Rp 7.461.500	100	22.50	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	22.50	100	Rp 7.461.500	100	22.50	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiIjen/Perhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	3.75	100	Rp 615.993.750	100	3.75	100	Rp 615.993.750	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Belum adanya capaian kinerja	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Menunggu informasi lanjut dari bagian keuangan DiIjen Hubdat Kemenhub	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp 87.500.000	0	100	0	Rp 87.500.000	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 7.461.500	100	6	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPPKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	24.99	100	Rp 50.000.000	100	24.99	100	Rp 50.000.000	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 7.461.500	100	2	100	Rp 7.461.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-3				REALISASI BULAN-3				% CAPAIAN BULAN-3		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	22.50	100	Rp 5,266,745,250	100	22.50	100	Rp 5,266,745,250	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	22.50	100	Rp 5,875,388,750	100	22.50	100	Rp 5,875,388,750	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN APRIL TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-4				REALISASI BULAN-4				% CAPAIAN BULAN-4		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	24.99	100	Rp 1,733,426,333	100	24.99	100	Rp 1,733,426,333	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 825,338,000	100	2	100	Rp 825,338,000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	24.99	100	Rp 5,452,568,333	100	24.99	100	Rp 5,452,568,333	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 765,826,667	100	2	100	Rp 765,826,667	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 9,948,667	100	23.76	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 9,948,667	100	23.76	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	22.50	100	Rp 9,948,667	100	22.50	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	22.50	100	Rp 9,948,667	100	22.50	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiijenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	3.75	100	Rp 821,325,000	100	3.75	100	Rp 821,325,000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Belum adanya capaian kinerja	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Menunggu informasi lanjut dari bagian keuangan Ditjen Hubdat Kemenhub	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp 116,666,667	0	100	0	Rp 116,666,667	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNE-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 9,948,667	100	6	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPPKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	24.99	100	Rp 66,666,667	100	24.99	100	Rp 66,666,667	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 9,948,667	100	2	100	Rp 9,948,667	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-4				REALISASI BULAN-4				% CAPAIAN BULAN-4		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	22.50	100	Rp 7,022,327,000	100	22.50	100	Rp 7,022,327,000	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	22.50	100	Rp 7,833,851,667	100	22.50	100	Rp 7,833,851,667	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN MEI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-5				REALISASI BULAN-5				% CAPAIAN BULAN-5		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	24.99	100	Rp 2.166,782,917	100	24.99	100	Rp 2.166,782,917	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 1.031,672,500	100	2	100	Rp 1.031,672,500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	24.99	100	Rp 6,815,710,417	100	24.99	100	Rp 6,815,710,417	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 957,283,333	100	2	100	Rp 957,283,333	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 12,435,833	100	23.76	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 12,435,833	100	23.76	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	22.50	100	Rp 12,435,833	100	22.50	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	22.50	100	Rp 12,435,833	100	22.50	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPKKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	15	3.75	100	Rp 1,026,656,250	100	3.75	100	Rp 1,026,656,250	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp -	0	100	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 12,435,833	100	6	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	24.99	100	Rp 83,333,333	100	24.99	100	Rp 83,333,333	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 12,435,833	100	2	100	Rp 12,435,833	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-5				REALISASI BULAN-5				% CAPAIAN BULAN-5		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	22.50	100	Rp 8,777,908,750	100	22.50	100	Rp 8,777,908,750	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	22.50	100	Rp 9,792,314,583	100	22.50	100	Rp 9,792,314,583	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN JUNI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6				% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	24.99	100	Rp 2.600.139.500	100	24.99	100	Rp 2.600.139.500	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 1.238.007.000	100	2	100	Rp 1.238.007.000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	24.99	100	Rp 8.178.852.500	100	24.99	100	Rp 8.178.852.500	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 1.148.740.000	100	2	100	Rp 1.148.740.000	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 14.923.000	100	23.76	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 14.923.000	100	23.76	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	22.50	100	Rp 14.923.000	100	22.50	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	22.50	100	Rp 14.923.000	100	22.50	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	3.75	100	Rp 1.231.987.500	100	3.75	100	Rp 1.231.987.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp -	0	100	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 14.923.000	100	6	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	24.99	100	Rp 100.000.000	100	24.99	100	Rp 100.000.000	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 14.923.000	100	2	100	Rp 14.923.000	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-6				REALISASI BULAN-6				% CAPAIAN BULAN-6		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	22.50	100	Rp 10,533,490,500	100	22.50	100	Rp 10,533,490,500	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	22.50	100	Rp 11,750,777,500	100	22.50	100	Rp 11,750,777,500	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN JULI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-7				REALISASI BULAN-7				% CAPAIAN BULAN-7		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	24.99	100	Rp 3.033,496,083	100	24.99	100	Rp 3.033,496,083	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 1.444,341.500	100	2	100	Rp 1.444,341.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	24.99	100	Rp 9,541,994.583	100	24.99	100	Rp 9,541,994.583	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 1.340,196,667	100	2	100	Rp 1.340,196,667	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 17,410,167	100	23.76	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	23.76	100	Rp 17,410,167	100	23.76	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	22.50	100	Rp 17,410,167	100	22.50	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	22.50	100	Rp 17,410,167	100	22.50	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	3.75	100	Rp 1,437,318,750	100	3.75	100	Rp 1,437,318,750	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp -	0	100	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada triwulan 3	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNE-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 17,410,167	100	6	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPPKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	24.99	100	Rp 116,666,667	100	24.99	100	Rp 116,666,667	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 17,410,167	100	2	100	Rp 17,410,167	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-7				REALISASI BULAN-7				% CAPAIAN BULAN-7		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	22.50	100	Rp 12,289,072,250	100	22.50	100	Rp 12,289,072,250	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	22.50	100	Rp 13,709,240,417	100	22.50	100	Rp 13,709,240,417	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN AGUSTUS AHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8				% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	%	%				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	KK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	66.64	100	Rp 3,466,852,667	100	66.64	100	Rp 3,466,852,667	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur.	Seksi LLJSDPP Seksi SAJSDP
			KK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Bimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 1,650,676,000	100	2	100	Rp 1,650,676,000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala
		KK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	66.64	100	Rp 10,905,136,667	100	66.64	100	Rp 10,905,136,667	100	100	100	Tercapai	Berkordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	Seksi LLJSDPP Seksi SAJSDP
			KK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 1,531,653,333	100	2	100	Rp 1,531,653,333	100	100	100	Tercapai	Berkordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	KK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Bimu	95	63.36	100	Rp 19,897,333	100	63.36	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Bimu	Seksi PJSDP
			KK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Bimu	95	63.36	100	Rp 19,897,333	100	63.36	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Panawala.
		KK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	60.00	100	Rp 19,897,333	100	60.00	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	Seksi PJSDP
			KK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	60.00	100	Rp 19,897,333	100	60.00	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	KK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	10.00	100	Rp 1,642,650,000	100	10.00	100	Rp 1,642,650,000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	Seksi PJSDP
			KK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan
		KK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	0.00	0	Rp -	0	100	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Laku Lintas Tahun 2024 akan dilaksanakan pada thulan 3	Seksi SAJSDP
		KK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 19,897,333	100	6	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menguji agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	Seksi SAJSDP
			KK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPPKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	66.64	100	Rp 133,333,333	100	66.64	100	Rp 133,333,333	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian etek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada
		KK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 19,897,333	100	2	100	Rp 19,897,333	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8				% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	KK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	60.00	100	Rp 14,044,654,000	100	60.00	100	Rp 14,044,654,000	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSDP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6 Meningkatnya Birokrasi Digen Perhubungan Darat Akuntabel	KK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Digen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran BPTD	90	60.00	100	Rp 15,667,703,333	100	60.00	100	Rp 15,667,703,333	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Digen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9				% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	74.97	100	Rp 3.900.209.250	100	74.97	100	Rp 3.900.209.250	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 1.857.010.500	100	2	100	Rp 1.857.010.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	74.97	100	Rp 12.268.278.750	100	74.97	100	Rp 12.268.278.750	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 1.723.110.000	100	2	100	Rp 1.723.110.000	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	71.28	100	Rp 22.384.500	100	71.28	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	71.28	100	Rp 22.384.500	100	71.28	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	67.50	100	Rp 22.384.500	100	67.50	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	67.50	100	Rp 22.384.500	100	67.50	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	11.25	100	Rp 1.847.981.250	100	11.25	100	Rp 1.847.981.250	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	300.00	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 semuanya berjalan dengan baik dan lancar	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	9.00	100	Rp 22.384.500	100	9	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	74.97	100	Rp 150.000.000	100	74.97	100	Rp 150.000.000	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 22.384.500	100	2	100	Rp 22.384.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9				% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	67.50	100	Rp 15,800,235,750	100	67.50	100	Rp 15,800,235,750	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	67.50	100	Rp 17,626,166,250	100	67.50	100	Rp 17,626,166,250	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN OKTOBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-10				REALISASI BULAN-10				% CAPAIAN BULAN-10		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	83.30	100	Rp 4.333.565.833	100	83.30	100	Rp 4.333.565.833	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 2.063.345.000	100	2	100	Rp 2.063.345.000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	83.30	100	Rp 13.631.420.833	100	83.30	100	Rp 13.631.420.833	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 1.914.566.667	100	2	100	Rp 1.914.566.667	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	79.20	100	Rp 24.871.667	100	79.20	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	79.20	100	Rp 24.871.667	100	79.20	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Pariwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	75.00	100	Rp 24.871.667	100	75.00	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	75.00	100	Rp 24.871.667	100	75.00	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPKKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	15	12.50	100	Rp 2.053.312.500	100	12.50	100	Rp 2.053.312.500	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	300.00	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 semuanya berjalan dengan baik dan lancar	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 24.871.667	100	6	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	83.30	100	Rp 166.666.667	100	83.30	100	Rp 166.666.667	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 24.871.667	100	2	100	Rp 24.871.667	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-10				REALISASI BULAN-10				% CAPAIAN BULAN-10		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	75.00	100	Rp 17,555,817,500	100	75.00	100	Rp 17,555,817,500	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	75.00	100	Rp 19,584,629,167	100	75.00	100	Rp 19,584,629,167	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN NOVEMBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-11				REALISASI BULAN-11				% CAPAIAN BULAN-11		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	91.63	100	Rp 4.766.922.417	100	91.63	100	Rp 4.766.922.417	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 2.269.679.500	100	2	100	Rp 2.269.679.500	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	91.63	100	Rp 14.994.562.917	100	91.63	100	Rp 14.994.562.917	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 2.106.023.333	100	2	100	Rp 2.106.023.333	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	87.12	100	Rp 27.358.833	100	87.12	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	87.12	100	Rp 27.358.833	100	87.12	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	82.50	100	Rp 27.358.833	100	82.50	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	82.50	100	Rp 27.358.833	100	82.50	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB DiJenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	15	13.75	100	Rp 2.258.643.750	100	13.75	100	Rp 2.258.643.750	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPPKB Molotabu dan UPPKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	300.00	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Rp 350.000.000	100	100	100	Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan, Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 semuanya berjalan dengan baik dan lancar	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 27.358.833	100	6	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	91.63	100	Rp 183.333.333	100	91.63	100	Rp 183.333.333	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 27.358.833	100	2	100	Rp 27.358.833	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-11				REALISASI BULAN-11				% CAPAIAN BULAN-11		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	82.50	100	Rp 19,311,399,250	100	82.50	100	Rp 19,311,399,250	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	82.50	100	Rp 21,543,092,083	100	82.50	100	Rp 21,543,092,083	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II GORONTALO

BULAN DESEMBER TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-12				REALISASI BULAN-12				% CAPAIAN BULAN-12		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
							VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%	VOLUME	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	99.96	100	Rp 5.200,279,000	100	99.96	100	Rp 5.200,279,000	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Kegiatan Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur;	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Terminal Penumpang Tipe A (Isimu dan Dungiing)	2	2.00	100	Rp 2.476,014,000	100	2	100	Rp 2.476,014,000	100	100	100	Tercapai	Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	- Seksi PJSDP
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	100	99.96	100	Rp 16,357,705,000	100	99.96	100	Rp 16,357,705,000	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2	Operasional Pelabuhan SDP Yang Beroperasi (Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat)	2	2.00	100	Rp 2,297,480,000	100	2	100	Rp 2,297,480,000	100	100	100	Tercapai	Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan	- Seksi PJSDP
2	SK 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	95.04	100	Rp 29,846,000	100	95.04	100	Rp 29,846,000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	- Seksi PJSDP
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	95	Melakukan Monev Survei Capaian Kinerja Pelayanan Terhadap Penerapan SMART di Lingkungan Terminal Tipe A Dungiing dan Terminal Tipe A Isimu	95	95.04	100	Rp 29,846,000	100	95.04	100	Rp 29,846,000	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik Akap/Parwisata.	- Seksi PJSDP
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Melakukan Monev Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	90	90.00	100	Rp 29,846,000	100	90.00	100	Rp 29,846,000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	- Seksi PJSDP
3	SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	90	Melakukan Monev Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional) Yang Telah Terpasang Di Wilayah Provinsi Gorontalo	90	90.00	100	Rp 29,846,000	100	90.00	100	Rp 29,846,000	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap perlengkapan jalan yang sudah terpasang.	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPKKB DiijenPerhubungan Darat	%	15	Melakukan Monev Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	15	15.00	100	Rp 2,463,975,000	100	15.00	100	Rp 2,463,975,000	100	100	100	Tercapai	Meningkatkan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di UPKKB Molotabu dan UPKKB Marisa	- Seksi PJSDP
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	Ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan di wilayah Provinsi Gorontalo	0	0.00	0	Rp -	0	0.00	0	Rp -	0	0	0	Belum Tercapai	Untuk tahun 2024 kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan belum di anggarkan	- Seksi LLJSDPP
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	300	Sosialisasi kampanye Pekan Keselamatan Transportasi Jalan	300	300.00	100	Rp 350,000,000	100	100	100	Rp 350,000,000	100	100	100	Tercapai	Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan,Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik dan Sosialisasi Sadar Lalu Lintas Tahun 2024 semuanya berjalan dengan baik dan lancar	- Seksi SAJSDP
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNE-ECE)*	Unit	6	Monev fasilitas alat pengujian kendaraan bermotor	6	6.00	100	Rp 29,846,000	100	6	100	Rp 29,846,000	100	100	100	Tercapai	Penyelenggaraan Pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan	- Seksi SAJSDP
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUKKB Secara Berkala di Dishub Kabupaten/Kota	100	99.96	100	Rp 200,000,000	100	99.96	100	Rp 200,000,000	100	100	100	Tercapai	Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan barang sesuai dengan aturan yang ada.	- Seksi SAJSDP
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	2	Melakukan Monev Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran TSDP di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Pelabuhan Penyeberangan Paguat	2	2.00	100	Rp 29,846,000	100	2	100	Rp 29,846,000	100	100	100	Tercapai	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	- Seksi LLJSDPP

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET DALAM PK	KEGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-12				REALISASI BULAN-12				% CAPAIAN BULAN-12		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
									TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KEGIATAN		REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN			
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Bantuan teknis perlengkapan jalan penghubung jalan nasional	90	90.00	100	Rp 21,066,981,000	100	90.00	100	Rp 21,066,981,000	100	100	100	Tercapai	Menyusun Rencana Induk Terhadap Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebagai pedoman pembangunan/pengembangan yang terarah dan terukur	- Seksi LLJSDPP - Seksi SAJSDP - Seksi PJSOP - Subag. Tata Usaha
5	SK 6	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 6.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Penyelenggaraan administrasi dan layanan perkantoran SPTD	90	90.00	100	Rp 23,501,555,000	100	90.00	100	Rp 23,501,555,000	100	100	100	Tercapai	Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat	- Subag. Tata Usaha



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI

  ditjen_hubdat

 hubdat151

  Ditjen Perhubungan Darat

 hubdat.dephub.go.id